

DAFTAR PUSTAKA

- Allang, A., Kunu. A. B. D., dan Mubarak. M. A. 2023. Pendaftaran Tanah sebagai Sarana Pengamanan Hak Milik Atas Tanah. *Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 23-30.
- Cahyono, E. D., Fairuzzana, S., Willianto, D., Pradesti, E., McNamara, N. P., Rowe, R. L., & Noordwijk, M. V. (2020). Agroforestry innovation through planned farmer behavior: trimming in pine–coffee systems. *Land*, 9(10), 363.
- Christensen, D., Hartman, A. C., & Samii, C. (2021). Legibility and External Investment: An Institutional Natural Experiment in Liberia. *International Organization*, 75(4), 1087-1108.
- Fehr, E., & Schmidt, K. M. (2004). Fairness and incentives in a multi-task principal–agent model. *The Scandinavian Journal of Economics*, 106(3), 453-474.
- Fisher, M.R.; Moeliono, M.; Mulyana, A.; Yuliani, E.L.; Adriadi, A.; Kamaluddin, ; Judda, J; Sahide, M.A.K. (2018). *Assessing the new social forestry project in Indonesia: recognition, livelihood and conservation?*. *International Forestry Review*, 20(3), 346–361.
- Friedman, R. S., Guerrero, A. M., McAllister, R. R., Rhodes, J. R., Santika, T., Budiharta, S., ... & Wilson, K. A. (2020). Beyond the community in participatory forest management: A governance network perspective. *Land use policy*, 97, 104738.
- Goncalves, A. P. R., Pope, K., Bonatti, M., Lana, M., & Sieber, S. (2018). Payment for environmental services to promote agroecology: the case of the complex context of rural Brazilian. *Sustainable Agriculture Research*, 7(2), 56-73.
- Nzyoka, J., Minang, P. A., Wainaina, P., Duguma, L., Manda, L., & Temu, E. (2021). Landscape governance and sustainable land restoration: Evidence from Shinyanga, Tanzania. *Sustainability*, 13(14), 7730.
- Maskey. S. (2020). Collaboration Challenges: Stakeholder Perceptions of Managing a National Forestry Program. A Case Study of the Multi Stakeholder Forestry Program in Nepal. PhD Thesis. Oregon State University.
- Moeliono M, Mulyana A, Adnan H, Yuliani EL, Manalu P, Balang. 2015. Hutan Desa: Pemberdayaan, Bisnis, atau Beban?. Brief 52. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.
- Nurana. Petani Wirausaha: Sukses Pasarkan Kopi Bantaeng dengan Cara Milenial dan Lestarkan Hutan. Diakses 14 April 2024.

- Pedoman Rakyat. Desa Campaga Harumkan Nama Bantaeng Lewat Penghargaan ADWI 2022. Diakses pada 10 Juli 2024.
- RECOFTC. (2018). *Brewing Local Entrepreneurship – Coffee Farming in Bantaeng, Indonesia*.
- Supratman & Sahide, M. A. K. (2013). *Hutan desa dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bantaeng*.
- Ungirwalu, A., San Afri Awang, Y. Y. R., Peday, M. Y., Marwa, J., & Maitar, B. (2022). Customary forests in West Papua: Contestation of desires or needs?.
- Veriasa, T. O., Daxoko, B. T., Imron, N. A., Kosar, M., & Santosa, A. (2024). *Meletakkan Inklusivitas dan Keberlanjutan Hutan Jawa: Studi Implementasi Perhutanan Sosial di Pulau Jawa*. PT. Penerbit IPB Press. ISBN: 978-623-111-136-4.
- Widayati, A., Khasanah, N., Prasetyo, P. N., & Dewi, S. (2014). *Upland Landscape Management for Drinking Water Provision-Biang Loe Catchment, Bantaeng, South Sulawesi*.
- Yuliani, E. L., Moeliono, M., Labarani, A., Fisher, M. R., Tias, P. A., & Sunderland, T. (2023). Relational values of forests: Value-conflicts between local communities and external programmes in Sulawesi. *People and Nature*, 5(6), 1822-1838.
- Zubayr, M., Darusman, D., Nugroho, B., & Nurrochmat, D. R. (2014). Principal-agent relationship in policy implementation of the use of forest area for mining activity, Indonesia. *Agriculture, Forestry and Fisheries*, 3(3), 181-188.

LAMPIRAN

Catatan Lapangan Wawancara bersama perwakilan BUMMas dan KPH Bialo	
Waktu wawancara: 30 Mei 2024	
Ketua Bumasp Sejak tahun – pergeseran ketua 2010 Sekertaris => 3 tahun => mengundurkan diri 2013 => ketua Hak kelola selama 35 tahun Kendala dimodal Mengelola: keadaan hutan => HL HHBK (kayu) madu & pariwisata Desa keramat Air => ada rencana, sawah 500 ha Masyarakat desa-desa tetangga Kecamatan Tidak menentu P3A => pengelola air (masyarakat) Erbol = milik masyarakat Erbol => di luar kawasan Air dari kawasan Lurah tidak dapat kontribusi Vegetasi rapat, tanaman sayur-sayuran	Kewajiban Menjaga dan memelihara Tidak ada pertanggungjawaban Tidak ada rapat Rapat: keamanan Kasus => pengambilan akan kayu Kayu => dilarang Awal-awal diberi peringatan Beri ancaman dibawa kantor KPH Atau ke provinsi, jarang bertemu di lapangan Orang luar (kabupaten lain) Revenue Madu BPSKL => KTH Bibit => (luar kawasan) Vegetasi BUMAS => todak ada, sukarela, tetutama air, tambahan pendapatam Tidak terlalu => sekali setahun 20-30 liter Kebersihan => kendala masalah plastik Pokdarwis ada bank sampah
Masalah wisata Sampah di luar KPH, Pokdarwis, peringkat 5 besar se-Indonesia Pokdarwis => konsultasi dan komunikasi LSM Balang Institute Buat peta, potensi wilayah Rencana kerja, RTHD dengan BPSKL & DLHK KTH Campaga = madu BUMAS menjual lokal => belum ada BPOM Ketua KTH Ketua BUMAS Regenerasi => cenderung Pokdarwis RECOFTC, Balang	KTH Hak Dibawah naungan Menjaga Secara utuh BUMAS => Kelurahan KTH dan Pokdarwis BUMAS => Lembaga Pemerdayaan Masyarakat Rencana kerja -> belum terealisasi Memfasilitasi kelompok Pembibitan KTH = 30 orang BUMAS = semua warga di Kel Campaga Benefit Kluwek, air, madu BPSKL => alat pengukuran masuknya air, koloni madu, ekonomi proaktif,

2009 => pengusulan	kebun bibit rakyat Kewajiban Pertemuan setiap bulan, rencana kerja tahunan, rencana kerja bulanan Didampingi penyuluh, local champion, polisi kehutanan dalam hal keamanan
KTH dibantu penyuluh Polisi kehutanan Bibit KTH (KTH Sujumara -> pembibitan bantuan, KPH, Pokdarwis, BPSKL, Balang ke KTH, RECOFTC/UNHAS) Balang mendampingi 2010 – 2012 DLHK 2017 ditarik RECOFTC => <i>save lard</i> BUMAS 5 tahun Awal 3 tahun Minta izin (utamakan orang asli, domisili asal, peduli Penyetaraan gender Buat menyadarkan Konflik => betul betul jarang Evaluasi => ke KPH (laporan penyuluh) Kemitraan	Hutan desa ada 1 orang masuk, luar daerah Dapat penghasilan dan penggerak Wisata (diatur Januari) (munyu-munyu => 1 tahun) KPH dan Dinas Pariwisata saling berkomunikasi Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Pokdarwis dan sebelumnya hanya ke KPH sekarang ke BUMAS juga Pokdarwis minta saran ke BUMAS komunikasi BUMAS: sudah banyak => manfaat? Bekerja => volunteer, keberlangsungan pemberdayaan pengurus (SDM). Insentif di BUMAS. Tidak memperhatikan apa arti hutan Lestari. Hutan tetap terjaga dan lestari, hutan tetap terjaga dan lestari, masyarakat berdaya => kehutanan prioritas Luas 23 ha, BPKH Pange, madu, jasa lingkungan
Ketua KUPS Madu Pange (sekali setahun) KTH => madu Sudah memenuhi Modal => untuk BPOM, Pemprov Koperasi => belum ada keputusan Diajukan ke BPSKL Yang di Gowa BUMAS (KUPS) => KPH => masyarakat LSM suka ke KTH LSM dan BUMAS Burung Indonesia RECOFTC BRIN (Penelitian Anggrek) Pokdarwis	27/5/2024 Telpn Pak Rahman Siapa yang mengajukan hutan desa? Itu program luar Siapa saja yang dilibatkan? Pihak-pihak tertentu: tokoh-tokoh masyarakat dengan kepala kelurahan, anu kehutanan Berhenti tahun berapa? 2013 DLHK => KPH: tidak ada pengaruh masih mudah berkomunikasi juga, agak sulit juga masalah informasi, komunikasi yang kurang Paham hutan desa? Lebih banyak yang tidak paham Kendala? Penyuluhan kurang, masyarakat tidak terlalu mengurus di dalam Ketergantungan: manfaat masih butuh

	hutan, kalau dikeramatkan, masalah masyarakat dapat air, menimbulkan suplai air banjir Kepentingan: penting hutan desa, masyarakat tidak serta merta merusak hutan, sebelum dan sesudah hutan desa
Kendala BUMAS: tidak terlalu aktif di BUMAS, sekedar ikut saja, kewajiban tidak terpenuhi Dari kehutanan: merasa terbantu karena ada masyarakat yang mengelola Kedepannya: kayaknya sulit, yang menjaga, pemikiran uang Wisata religi: menjanjikan, masyarakat berubah Kalau menurut saya: hutan wisata => misal dijadikan pendidikan wisata, cuman kesulitan mendapatkan modal Koperasi Akar Tani? Itu hanya 2 desa (Patteneteang dan Labbo) BRIN: beri uang terima kasih Skema: diberi uang jalan BUMAS: perlu diberi pembekalan, aktivitas pendanaan RECOFTC, UNHAS => pengelolaan => perizinan Bagaimana dibina terus=> sosialisasi kurang, informasi dari mulut ke mulut Perubahan signifikan? Diberikan keleluasaan untuk pange dan madu BUMAS membeli lalu menjual keluar	KPH => membimbing tapi sekarang belum Kalau ada proposal (membantu). Saya aktif di KTH, BUMAS ke kabupaten, BUMAS tidak ada payung hukum. BUMAS: waktu melapor? Ada beberapa instansi? Pariwisata? Dinas Pariwisata tidak mau dibawah naungan BUMAS. Namun ke Pokdarwis, ada menimbulkan konflik antara BUMAS dan Pokdarwis => pertemuan itu sudah ada dan diselesaikan ke BUMAS

Transkrip Wawancara bersama Perwakilan Kelurahan Campaga

Waktu wawancara: 7 Juli 2024

Perwakilan huruf dalam wawancara:

M: (Perwakilan Kelurahan Campaga)

W: (Wening-Pewawancara)

M	Pak Rahman banyak tahu tentang BUMAS karena memang dia adalah masyarakat Kelurahan Campaga dan berdomisili di situ. Asli dan nda pernah pindah-pindah. Jadi Pak Rahman adalah Ketua BUMAS, kalau di Campaga dibilang Direktur BUMAS. Jadi, kalau Pak Rahman ya semua bersangkutanpaut dengan hutan lindung dia ketahui semua. Mulai dari awal sampai akhir. Awal mula terbentuknya Kelurahan Campaga, kenapa dinamakan Campaga. Dia tahu semua itu, seluk beluknya dan asal mulanya. Kalau saya ya orang baru tahun kemarin. Orang dari Kecamatan lain saya dimutasi ke situ.
W	Oh, baru berapa tahun Bu?
M	Baru tiga tahun.
W	Sebelumnya berdomisili di mana Bu?

M	Sebelumnya kan d Kantor Camat Tompobulu, terus dimutasi ke Kantor Lurah jadi setidaknya saya kaau misalnya ada enelitian soal hutan lindung ya diarahkan ke BUMAS, Direkturturnya to. Karena yang mengetahui semua itu adalah BUMAS.
W	Nah itu anggota BUMAS sekarang berapa Ibu?
M	Anggota BUMAS sekarang bisa di... Pas di depan rumahnya Pak Saparuddin, bisa juga ditanya Pak RT di situ.
W	Oh RT
M	Iya, RT 1 RW 1.
W	Dia sebagai wakil atau apa Bu?
M	Bukan wakil tapi saudara dari Pak Direktur dan banyak tau tentang itu Hutan Desa Campaga. Kalau bis akita tanya dia, kan kemarin waktunya ADWI dia yang masuk.
W	Ap aitu ADWI Bu?
M	Perlombaan desa wisata. Lomba desa wisata yang temani tim ADWI masuk ke hutan lindung. Dia ditanya bahwa ini pohon apa? Ini tempat apa? Dia jelaskan semua bahwa tempat ini adalah kalau sudah panen atau sudah mau tanam, dia masuk di rumah-rumahnya itu. Maksudnya dia berbentuk syukuran. Tapi orang campaga dibidang maccaru-caru toh. Masuk di sana bakar-bakar ayam, baru di sana makan. Ada pinaci-nya memang. Untuk baca-baca songkolo.
W	Tapi dalam kepengurusan Ibu saat ini, bagaimana hutan desa diarahkan? Kan ibu sudah 3 tahun harapannya untuk hutan desa bagaimana? Dan sejauh ini programnya apa saja Bu?
M	Kalau hutan desa itu programnya, kalau misalkan pohon atau kayu yang tumbang di dalam, ditanami, diganti. Karena tidak ada masyarakat yang membabat, menebang, apalagi mengambil kayu bakarnya. Jadi hutan lindung itu tetap terawat. Karena hutan adalah satu-satunya di Campaga sumber airnya banyak di dalam. Mengairi beberapa hektar sawah dan airnya itu keluar di desa tetangga untuk diminum, dikonsumsi toh. Masuk ke Kecamatan Pajukkukang, disana dikonsumsi. Alhamdulillah masyarakat di Kelurahan Campaga itu tidak ada yang berani, karena dianggap hutan itu dikeramatkan. Kalau dikeramatkan itu artinya tidak ada yang bisa masuk. Ambil apa-apanya di dalam tidak bisa, apalagi menebangnya.
W	Nah, itu setiap tahunnya apakah dibuat semacam rencana kerja atau bagaimana ibu?
M	Kalau setiap tahunnya itu, tidak ada rencana kerja. Sebab, kecuali kalau ada kayu di dalam ada yang rusak, ditanami.
W	Jadi tidak ada semacam proposal atau ..?
M	Tidak ada.
W	Apakah kelurahan mengarsipkan RKHD atau dokumen yang berkaitan dengan hutan desa?
M	Kalau di kantor iya, dokumennya hutan desa aitu semuanya ada di Pak Rahman.
W	Tapi kelurahan tidak memiliki duplikat dokumen Bu?
M	Kalau ya di kelurahan tidak ada, tapi hanya luas hektarnya hutan lindung di situ. Kalau di Kelurahan Campaga, dokumen berapa jumlah kayu ini, selama saya jadi lurah nda ada. Karena dari UNHAS katanya dulu pernah melabel.

	Melabel kayu-kayu itu di dalam. Tapi saya sekarang, ndak ... kurang. Kurang mi, banya yang hilang. Daftar nama kayunya itu banyak yang hilang.
W	Tapi dari kepengurusan lurah yang dulu dan sekarang, apa kira-kira perbedaan yang terjadi di hutan desa ibu?
M	Sejak ... perbedaannya itu nda ada perbedaan. Maksudnya dulu sampai sekarang, Cuma masyarakat kan menjaga hutan lindung, nda ada yang berani. Menjaga mulai dari sebelum say amasuk lurah sampai sekarang, tidak ada yang berani. Jadi tidak ada ji perubahan, mau pembabatan atau mau program ini. Nda ada.
W	Lalu bu, untuk pengurusan hutan desa itu cuma BUMAS atau kayak misal ada karang taruna yang diajak, GAPOKTAN atau ada yang lain ibu? Atau cuma BUMAS yang mengurus?
M	Ya, kalau begitu maksudnay Cuma BUMAS yang ngurusi. Tapi semau masyarakat Kelurahan Campaga wajib untuk melihat bawa hutan lindung nda bisa dibawa, untuk memeliharanya itu. Semua warga Kelurahan Campaga itu melihat bahwa hutan lindung nda bisa, tapi yang mengurus semua itu adalah BUMAS. Tapi lebih khusus lagi adalah masyarakat Kelurahan Campaga yang bisa melindungi hutan lindung. Hutan lindung adalah sumber mata air yang tidak bisa dibabat hutannya.
W	Berarti tidak ada semacam ini ya bu, seperti Karang Taruna diarahkan untuk ikut mengurus hutan desa? Katakanlah menanam yang tadi tumbang? Atau memang cuma Pak Rahman yang menanam apabila ada yang tumbang Bu?
M	Ya kadang, kalau misalnya banyak yang mau ditanami diarahkan Pokdarwis toh, karang tarunanya sekarang kan tidak aktif lagi. Bisa diajak Pokdarwis dan anggota masyarakat RT RW dan staff Kelurahan Campaga. Kalau sudah banyak yang menanam pohon di dalam hutan ya semua diarahkan oleh Pak Rahman bahwa mari kita menanam toh, begitu. Mari kita menanam pohon karena banyak yang sudah lapuk.
W	Bibitnya dari mana ibu?
M	Biasa dari Bulukumba
W	KPH ya Ibu?
M	Iya, KPH kehutanna. Kalau misalnya kita minta yang kesitu yah, dia kasih.
W	Mereka yang datang untuk bawakan bibit atau ...?
M	Nabawakanki, biasa bawa ke kantor. Di kantor lurah pi disimpan baru sama-sama menanam.
W	Siapa yang mengantar ni ibu? Penyuluh, Pak Kahar atau siapa yang kemarin?
M	Yang kemarin dulu itu , kan ada dulu anunya KPH, yang KPH antar kesitu.
W	Sudah lama ya ibu berarti?
M	Belum ... belum lama. Ada berapa puluh itu. Karena banyak itu di dalam, akar-akarnya kayu yang diambil menjadi, dikasih campuran dengan minuman-minuman anu
W	Itu masyarakat yang mengambil ibu?
M	Iya, tapi bukan masyarakat dari Campaga, tapi masyarakat dari luar. Justru itu kalau Pak RT dan Pak RW di sini kalau tahu ada orang masuk di hutan lindung ya dilarang, karena mematikan pohon-pohon besar di dalam. Kan ada memang itu dikasihcampurkan namanya anu ballo' kalau disitu. Minman-minuman haram itu yang terbuat dari aren. Itu ada di dalam akarnya diambil dari pohon

	besar, dikasih turun ke minuman itu, untuk bisa memabukkan. Iya!
W	Nah itu ibu, kan seharusnya hutan desa itu memebrikan manfaat ekonomi. Misalkan masyarakat di Patteneteang itu kan menanam kopi di dalam. Kenapa dari Campaga tidak memanfaatkan itu Bu?
M	Iya, kataanya masyarakat Kelurahan Campaga kan ada tanahnya tersendiri. Yang dibilang, kenapa mesti menanam di dalam. Yang mesti diambil di dalam itu ya kluwek, pange kalau di sini. Itu yang bisa dimanfaatkan masyarakat, sebagai sumber perekonomian juga pemasukan juga kepada masyarakat yang bisa mengambilnya. Karena tidak sembarang bisa masuk, kkrena dipanjatpi. Jadi itu kluwek to, pangi kalau di sini bisa dimanfaatkan untuk kulitnya dimasak sayur, didalanya atau apakah, yang isi dagingnya bisa dimasak sayur. Jadi kalau tidak diolah bisa menjadi kluwek toh. Kalau disini masyarakat ambil itu menjadi sayur, bisa dikasih campur dengan ikan, isinya itu. Yang coklat-cokelat di luarnya dibikin sayur.
W	Nah ini Bu, BUMAS itu apakah hanay mengurus hutan desa atau ... kan dibawah BUMAS kan ada unit-unit usaha, nah itu unit-unit usahanya apakah hanay hutan desa atau ada yang lain?
M	Ada itu apa namanya lebah madu yah, waktu itu masih dibawa di kantor camat. Ada Anunya BUMAS itu budidaya madu di pinggir-pinggir hutan itu. Tapi sekarang saya lihat, entah dibawa Pak Rahman ke sarangnya itu dibawa ke rumahnya atau bagaimana. Karena banyak sekali itu anunya, budidayanya, sarang lebah.
W	Apakah sudah berhasil ibu atau sampai komersialisasi?
M	Tidak, nda berhasil mi toh.
W	Jadi bagaimana BUMAS ini finansialnya ibu? Darimana sumber finansialnya BUMAS?
M	Ya, saya kurang tahu itu mi. Bagaimana Pak Rahman anunya kepengurusannya. Kan selama in ikan saya nda pernah kasih anu kepengurusannya itu. Barangkali dari KPH, KPH untuk kepengurusannya itu. Sampai sekarang kan, kecuali kalau desa-kan ada dari ADD toh. Kalau saya endak. Katanya Pak Rahman kemarin, "Ah sukarela saja."
W	Sukarela dari masyarakat atau anggota BUMAS?
M	Sukarela bekerja ya artinya nda ada apa apa. Maksudnya ya bekerja untuk karena Allah barangkali, untuk melindungi hutan lindung supaya tidak ada yang membabat.
W	Sulitnya ini bu ya, tidak ada yang menanam di dalam sehingga tidak ada pendapatan. Tapi bu, masyarakat memang sudah punya lahan ya di luar hutan desa.
M	Sudah punya dan dianggap kan hutan lindung dikeramatkan. Jadi nda ada yang berani masyarakat, kan itu hutan lindung. Ya memang banyak yang mau diambil di dalam. Cuma sebahagian kecil yang bisa memanfaatkan hutan lindung, itu mi pange kluwek yang bisa dimanfaatkan. Itu yang biasa mi masuk ambil, tapi kalau masyarakat-masyarakat anu yang masuh, eh nda bisa ambil. Karena itu mi takut.
W	Kalau yang lurah sebelumnya itu siapa ya ibu?
M	Lurah sebelumnya itu sudah 3, lurah pertama sudah meninggal, lurah kedua Pak As'ad, jadi lurah ketiak Syamsul Syaiful, keempat Andi Zainal, yang

	kelima sayami.
W	Itu yang mengurus hutan desa kira-kira darimana ibu? Pak As'ad atau ...?
M	Dari Pak Syamsul Syaiful
W	Orangnya masih ada ibu kira-kira?
M	Masih ada tapi sudah tinggal di Gowa.
W	Gowa mana ibu?
M	BTN apa itu?
W	BTN, oh dekatnya jembatan kayaknya ya.
M	Kayaknya itu deh, itu-itum kalau Syamsul Syaiful.
W	Kalau satunya itu ibu?
M	Kalau satunya itu Andi Zainal Sofyan, sebelum saya toh, itu tinggal di Banyorang.
W	Kalau namanya Ibu?
M	Mardia kalau saya.
W	Kalau nama sebelum Pak Andi Zainal?
M	Andi Zainal Sofyan.
W	Jadi yang paling pertama mengurus ini Pak Syamsul Syaiful dan ibu mulai menjabat pada tahun 2021 atau 2020 ya Bu?
M	Entahlah itu deh, tahun 2000 berapa, sudah lama. Masanya Pak Nurdin! Nah dua periode Pak Nurdin. 2004 kapang?
W	Itu di kecamatan ya ibu?
M	Kalau saya kecamatan 2007-2011, masuk lagi di Kantor Lurah Eseklur 2011-2022. 2022 masuk lagi lurah di sini.
W	Akhir-akhir COVID yah ibu.
M	Iya COVID! Saya itu kena COVID.
W	Tapi disini apakah ada perubahan signifikan pada perekonomian?
M	Ya alhamdulillah, ada perubahan perekonomian setelah adanya wisata Erbol Ertop.
W	Yang munyu-munyu dibangun POKDARWIS?
M	Beda lagi. Yang positifnya itu Erbol dan Ertop itu masuk penilaian waktunya ADWI. Jadi alhamdulillah penunjang dari Ertop Erbol dengan air terjun. Setelah adany semua destinasi ini, tempat wisata ini maka pendapatan perekonomian masyarakat berangsur-angsur pulih. Apa sebabnya, yang dipekerjakan di dalam Ertop itu adalah orang yang tarif ekonominya rendah. Awalnya bisa dia pergi merantau atau bekerjanya itu mencuri atau kerjanya minum-minum khamr. Tapi setelah adanya Ertop maka disitu diambil untuk dipekerjakan di dalam. Jadi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, perekonomian Kelurahan Campaga tidak berlangsung ini dan berangsur-angsur pulih. Karena buahnya masyarakat bisa dijual di pinggir-pinggir jalan. Jadi ada pemasukan untuk masyarakat setempat bahwa denagn hasil buahnay itu, atau apanya dari kebunnya itu bisa menghasilkan uang. Yang dipekerjakan itu di dalam ya rata-rata orang miskin yangd apat bantuan dari raskin atau apa dari saya toh dari kelurahan. Jadi bisa diangkat keluarganya dan menyekolahkan anaknya melalui permandian itu.
W	Itu mereka tidak mempunyai lahan atau bagaimana ya ibu?
M	Ya ada lahannya tapi sedikit toh. Nda menunjang uang belanjanya untuk anak-anaknya semua. Kalau misalnya dia kasih sekolah.

W	Oiya bu, kan airnya Ertop dan Erbol itu dari hutan desa, apakah ada semacam retribusi dari mereka?
M	Tidak ada.
W	Tidak ada pembahasan atau mereka tidak mau memberi?
M	Maksudnya kita di pemerintah setempat itu maksudnya nda mau. Kayaknya dia nda mau repot. Kayaknya dari hutan lindung itu airnya masuk di situ. Jadi biarkan saja.
W	Kira-kira kalau mereka diminta retribusi itu mau atau tidak ibu?
M	Iya barangkali tidak. Tapi entahlah, karena tidak pernah juga minta.
W	Kenapa tidak pernah minta ibu? Siapa tau jadi salah satu sumber finansialnya BUMAS?
M	Iya di, bisa. Karena kita pikir ini, orang-orang memang masyarakatnya orang di sini. Dan dia adalah tokoh masyarakat di sini. Iya di situ.
W	Siapa ibu?
M	Bapaknya itu Haji Hanafing
W	Siapa itu Haji Hanafing ibu?
M	Haji Hanafing itu direktur Erbol, Suyuti.
W	Ini orang yang dihormati ya ibu di sini, karena apa Ibu?
M	Karena memang dia tahu seluk beluk Kelurahan Campaga dan memang orang yang ada toh. Orang ada. Sehingga dia membangun di lahannya itu permandian. Nda ada retribusi yang masuk di Kelurahan Campaga itu. Kecuali kalau dia itu kerja bakti yah dikasi dibelikan apa kadarnya itu.
W	Itu dibelikan sama Erbol? Oh mereka itu memberikan apa ibu? Semacam makanan?
M	Minuman-minuman. Kalau misalnya dibilang, “Mau kerja bakti Pak Suyuk”, “Iyye’ nanti saya beli bensin buat babat anunya toh”.
W	Ini ibu pertanyaan saya, ini masyarakat ada yang lahannya sedikit kayak tadi mereka yang kerja di Ertop. Kenapa mereka tidak diberi saja seperti hutan desa ibu?
M	Tidak bisa. Mereka itu takut.
W	Siapa saja ibu yang bisa masuk hutan desa? Berapa orang?
M	Ya ada sih beberapa. RT RW. Itu juga RT RW tidak sembarang masuk, yang mengetahui saja seluk beluk hutan lindung. Karena mereka takut kalau mereka masuk ada hal-hal mistis yang kena saya. Dia bilang, jadi memang itu pinacinya hutan lindung kalau misalkan itu dia habis panen atau mapanen, eh .. masuk. Ada memang khusus dipanggil untuk syukuran dia, kalau mau habis panen padi, masuk lagi syukuran. Memang ada khusus itu pinacinya.
W	Nah itu ibu kan orang-orang tua, berarti tidak ada sama sekali anak muda yang bisa masuk ibu?
M	Ada tapi ditemani sama orang-orang tua.
W	Tapi suatu hari apakah anak-anak ini bisa sendiri atau bagaimana?
M	Ya mudah-mudahan kedepannya bisa memahami apa yang ada di hutan lindung dan bisa diberitahu oleh orang tuanya. Kalau misalkan di hutan lindung itu tidak berbuat macam-macam di dalamnya tidak bisa. Jadi memang sudah ditanamkan ini ke anak-anaknya bahwa kalau masuk di hutan lindung harus memberi salam, tidak bisa meludah, tidak bisa memetic daun-daun apa saja. Jadi kayak POKDARWIS dan pengurus-pengurusnya itu bisa memahami

	dan masuk ke hutan lindung itu.
W	POKDARWIS itu isinya anak muda ya ibu?
M	Anak muda sebagian dan sudah berkeluarga sebagian.
W	Berarti anak Karang Taruna lari ke Pokdarwis semua ya ibu?
M	Tidak semuanya karena Karang Taruna itu banyak kesibukan lain sehingga tidak Maksudnya dibidang ad aitu ndak jalan.
W	Berapa tahun itu tidak jalan Karang Taruna ibu?
M	Karang Taruna ada berapa tahun di?
W	Lama ibu?
M	3 tahunan.
W	Jadi ketika ibu masuk masih aktif?
M	Iya 2011.
W	Ibu, jadi kalau saya mau tanya sejarah ini saya ke Pak Syamsul Syaiful dan Pak Andi Zainal di Banyorang?
M	Sejarahnay itu bisa kita ambil di Pak RT.
W	Pak RT mana dan siapa namanya ibu?
M	Nanti saya telponkan ki, saudaranya Pak Rahman
W	Oh yang di depan rumahnya ya bu.
M	Saya telponkan dan beritahu ada anak penelitian dari UNHAS.

Transkrip Wawancara bersama Perwakilan BUMMas) dan Perwakilan POKDARWIS)

Waktu wawancara: 7 Juli 2024

Perwakilan huruf dalam wawancara:

S: (Perwakilan BUMMas)

I: (Perwakilan POKDARWIS)

W: (Wening-Pewawancara)

S	Kemarin ada pembibitan di sini, dari kehutanan itu. Jadi bibit-bibit yang kami buat itu ditanam di hutan atau teman-teman yang punya lahan kosong dan mau dijadikan hutan, dikasih bibit. Seperti itu.
I	Mintakah profil desa ke ibu lurah?
W	Oh itu dicarikan anaknya Pak Rahman di depan kak.
I	Oh ada ji.
S	Ada ji dia.
W	Iya sedang dicarikan
I	Dianak-anak itu pas profil desa.
W	Di anak KKN? Coba saya minta nanti.
I	Iya.
W	Tapi untuk ini pak
I	Atau di sana maki duduk-duduk?
W	Oh iya kak, nanti saya menyusul. Tapi pak, untuk KTH itu sumber keuangannya bagaimana, apakah ada sistem kas atau apa?
S	Tidak ada. Kalau dari ada maca mini, program-program dari kementerian kan. Atau dari kehutanan ya itu-itu saja yang kita kelola.
W	Misalkan apa Pak?
S	Misalkan pembibitan, pengadaan bibit, pengadaan pupuk, pengadaan armada begitu. Kalau macam ini kan yang pegang ini kan dari kelompok tani.

W	Kalau lebah madu ini bagaimana progress nya Pak?
S	Kalau lebah madu hutan kayaknya sekarang agak-agak ini juga. Bahkan madu sekarang itu susah. Susah karena apa itu, bunga-bunga kayu sudah berkurang. Kita mau bawa ke hutan ini tidak lama juga karena disambar sama orang-orang nakal
W	Oh, ada orang masuk pak?
S	Iya.
W	Saya pikir karena keramat, tidak ada yang masuk pak.
S	Oh kalau macam madunya di dalam, tidak ada yang berani. Tapi kalau macam yang kitab awa-bwa masuk itu ada yang naka-nakal itu. Kalau pohon-pohonnya tidak berani kita ganggu.
W	Oh tapi kalau benda-benda begitu
S	Kalau benda-benda begitu biasa diganggu orang.
W	Berarti sekarang itu Pak, dibawah BUMMAS kan harusnya ada unit usaha. Itu berarti BUMMAS kerjasamanya sama KTH saja Pak? Kalau Pokdarwis Pak posisinya untuk saat ini?
S	Pokdarwis itu dulunya terlibat. Cuma karena saya tidak terlalu tahu tentang itu.
W	Bagaimana ini kedepannya BUMMAS pak, apakah ada anak muda atau bagaimana?
S	Ya bagusnya begitu, supaya tidak jalan di tempat toh.
I	Ini dari anak-anak saya ambil
W	Ini profil kak?
I	Iyye', profil desa. Tapi nda lengkap itu, kaha nak-anak yang buat itu, angkatan 111.
W	Oh anak-anak KKN! Oh iya kak, mau tanya, kakak bagian dari Pokdarwis kan?
I	Iya saya.
W	Kan begini kak, saya penelitian tentang hutan desa dan ingin tahu kelembagaan sebelum ada hutan,waktu ada hutan desa dan ada donor, dan setelah ada hutan desa dan tidak ada donor. Posisinya sekarang kan ada hutan desa dan tidak ada donor yang kalau dulu itu RECOFTC, UNHAS dan berhenti tahun 2017 kalau nggak salah katanya Pak Rahman. Kalau sekarang kan murni masyarakat sendiri yang mengelola, nah karena itu pengen tahu siapa saja yang mengurus hutan desa.
I	Sekarang ini kan fokus ke BUMMAS ki untuk hutan desa.
W	Kemarin katanya Pak Rahman, untuk unit usaha pariwisata itu diurus Pokdarwis. Nah itu bagaimana asal mulanya kak? Kan Pokdarwis bekerjasamanya dengan Dinas Pariwisata, bukan dengan Dinas Kehutanan.
I	Maaf mami di, nda terlalu kutahu asal mulanya.
W	Uhm, berapa lama ini Pokdarwis kak?
I	Kalau Pokdarwis dari tahun 2022. Tapi saya baru bergabung dari kemarin. Sebenarnya dulu saya dipanggil, tapi saya nda ada kesempatan.
W	Itu isinya anak muda atau ...?
I	Anak muda
W	Semua?
I	Semua.

W	Bukan Karang Taruna, Kak?
I	Bukan, lain kalau Karang Taruna.
S	Karang Taruna itu juga sekarang jalan di tempat.
I	Nanti kukabari Ketua Pokdarwis.
W	Aman-aman kak! Terus, bagaimana Pokdarwis berjalan Kak? Berapa jumlah anggotanya?
I	Kalau sekarang 21.
W	Nah, sekarang kan sudah ada wisatanya. Bagaimana pembagian kerjanya Kak?
I	Kita terbagi antar divisi ka juga. Ada divisi apa gitu di. Kalau saya SDM, itu pendekatannya ke fokus Sekolah Rimba. Peningkatannya ke arah-arrah anak-anak sekolah. Apalagi divisinya di'?
W	Ada banyak berarti kak?
I	Banyak-banyak
W	Tapi kalau, kan kakak Sekolah Rimba, itu sudah banyak yang mau ikut kak?
I	Itu juga kesusahan kita di branding kita. Jadi sekarang kita masih fokus anak PAUD di sini. Ada beberapa yang dari luar sekolah SMP, dia yang meminta langsung untuk Sekolah Rimba. Sekolahnya itu mengajarkan tentang kontur tanah, menanam, itu saja. Itu di', dasar-dasar.
S	Nama-nama jenis-jenis kayu, pepohonan.
W	Nah itu kak, apakah ada semacam retribusi ke BUMMAS atau perjanjian sekian persen diberikan ke BUMMAS.
I	Kayaknya tidak.
W	Kenapa kak tidak? Kan ini masuk hutan desa dan memanfaatkan hutan desa ceritanya kak.
I	Aduh, saya kurang tahu komunikasinya Ketua BUMMAS dengan Ketuanya Pokdarwis. Tapi kalau untuk kontribusinya, kayaknya masuk ke kas Pokdarwis deh. Kalau misalkan dari luar ada meminta toh, kita apa enath konsumsinya lebihnya masuk ke ini kas.
W	Sudah seberapa ramai itu wisata kak?
I	Rame sih kalau Pokdarwis. Karena kan kita bentuk juga yang dijual-jual, kayak usahanya Pokdarwis. Souvenir-souvenirnya begitu.
W	Di sini (Profil Desa) kan ada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Pelatihan, dan Kelompok Tani. Nah ini aktif semua?
S	Iya kalau kelompok tani jalan.
I	Kalau pelatihan itu masih jalan di Pokdarwis
W	Kalau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini kak?
I	Hujh, itu tidak jalan!
W	Bedanya Kelompok Tani Mattiro Baji dan Kelompok Tani Cempaka Indah ini apa Pak?
S	Mattiro Baji? Siapa punya itu?
I	Simokko
S	Nda tau itu
W	Masuk hutan desa atau tidak itu Pak, Mattiro Baji? Atau hanya Cempaka Indah?
S	Setau saya Cempaka Indah saja.
I	Tapi kayaknya ada beberapa kelompok tani, ehkk KTH Cempaka Indah Apa seng? Cuma ndak lengkap ini memang.

W	Ah iya iya Kak. Berarti bisa dikatakan yang mengelola hutan desa paling dominan adalah Pokdarwis ya Kak?
I	Iya Pokdarwis sam BUMMAS di.
W	Kalau BUMMAS ini melalui KTH. Tapi KTH ini tidak terlalu kan ya pak, karena kebunnya di luar semua.
S	Iya, iya.
W	Tapi untuk KTH itu Pak, apakah sudah sempat menjual?
S	Maksudnya menjual apa?
W	Kan untuk kegiatannya kan ada lebah madu dan ada apa ada apa, mah itu sempat menjual Pak?
S	Kalau madunya sudah, tapi kalau hasil-hasil dari huatn itu masih dikelola oleh masyarakat. Bukan BUMMAS itu, masih masyarakat sekitar sini. Kayak di dalam itu ada paneg kan, papaya. Masih dikelola oleh masyarakat. Karena sebelum ada BUMMAS, masyarakat memang sudah mengelola, kita mau ambil alih, kita ndak enak juga dengan masyarakat.
W	Di dalam itu saling menandai kayak ini pohonku ini pohonku atau bagaimana Pak?
S	Oh endak-endak. Semau mereka, kalau mereka punya kesempatan, silahkan saja. Yang penting tidak merusak.
W	Pakai sistem izin atau tidak.
I	Kalau petani pepaya tidak.
W	Oh bisa menanam di dalam Kak?
I	Kan itu papaya bisa dikatakan tanaman liar. Dia pemberdayaannya diambil buahnya dan dijual.
W	Tanpa menanam.
I	Tanpa menanam. Karena kan tumbuh sendiri di situ.
W	Banyak Pak?
S	Banyak. Ada mungkin kalau kita hitung-hitung ndak lebih itu dari 10.000.
W	Akses masuk hutan desa masuk sekali ya pak?
S	Mudah.
W	Lewat sini ya pak (menunjuk ke perempatan dekat rumah narasumber)
S	Dekat, perempatan itu lurus. Ada sekitar ada kurang lebih 500 meter.
I	Tapi kalau untuk masuk sekarang, harus dengan persetujuan BUMMAS
W	Kenapa kak?
I	Itu juga karena saya kurang tahu. Mungkin karena ada penebangan baru-baru ini. Baru-baru yang pinggiran bermasalah.
W	Yang ditangkap polhut ya kak.
I	Iya, ada yang diproses sama polhut.
S	Yang kayu ini kan
W	Berarti kak, boleh saya simpulkan untuk saat ini peneglolanya itu BUMMAS. Pokdarwis itu dalam naungan BUMMAS.
I	Apa di', bukan naungan. Tapi Pokdarwis berdiri sendiri. Kerja samanya lah BUMMAS.
W	Kalau yang lain tidak jalan kan kak? LPM dan lain-lain?
I	LPM jalan itu Pak Hasri.
W	Fokus di hutan desa atau yang lainnya.

I	Pertanian kayaknya bapak di'?
S	Iya!
W	Terus kedepannya kira-kira dari Pokdarwis ingin melakukan pengembangan atau bagaimana kak?
I	Iya, rencana ini untuk Tapi saya fokusku ke Sekolah Rimba saja, kita susur SMP-SMP saja di wilayah Bantaeng dulu.
W	Kira-kira kak, kan ini hutan desa izinnya 35 tahun. Kan sekarang 14,5 tahun dan sisa setengah jalan lagi. Nah itu terus tujuan dari Hutan Desa kan memberikan manfaat secara ekonomi ke masyarakat, tapi BUMMAS sebagai pemegang izin finansialnya kurang jelas kalau dibanding Pokdarwis. Nah itu bagaimana kalau dari sisi Pokdarwis sendiri kak?
I	Wah bagaimana bahasanya di', itu juga saya kurang tahu tentang cara pengelolaan dananya BUMMAS. Kalau Pokdarwis kan kita terstruktur mangkannya enak kalau Pokdarwis. Baru kan di back up sama Dinas Pariwisata sama sekarang itu Lingkungan Hidup juga.
W	Dinas pariwisata ini memberikan pendanaan tahunan atau bagaimana kak?
I	Tidak sih, Cuma back up sebatas nda ada kalau bicara dana. Back up nya ini seperti persuratan, Support support yang non-material.
W	Terus DLHK sendiri bagaimana sistemnya kak? Dibagian mana yang dibantu?
I	Ah, saya kurang tahu kalau itu. Kutelpon anunya di', supaya na anu.
W	Sama mungkin saya minta nomornya kak.
I	Boleh. Saya juga kurang aktif sebenarnya di kampus, baru ma ini ditarik.
W	Berapa ini kak biaya masuk untuk Sekolah Rimba dan River Tubing?
I	Kalau river tubing itu ada divisinya sendiri. Kalau sekolah rimba biasanya 50 per orang. Tapi kalau anak-anak PAUD di sini endak ji. Itu ju kalau misal ada sekolah dari luar meminta.
W	Tapi kira-kira pak apakah anak muda mungkin dari Pokdarwsi ada yang mau meneruskan BUMMAS. Kan dari dulu ini Pak Rahman.
I	Kalau bisa saya ya saya.
W	Kalau semangatnya anak-anak ke BUMMAS bagaimana Kak? Atau semua ke Pokdarwis yah.
I	Kalau sekarang sih Pokdarwis, karena data kelola wisatanya kan terstruktur. Baru wisata disini kan banyak ada Ertop, Erbol, River Tubing.
S	Ertop dan Erbol itu mandiri
I	Yang mandiri di tempat kami itu juga river tubing. Bukan punya Pokdarwis, tapi kita yang kelola. Kan kalau in ikan mandiri Ertop, Erbol. Ini juga Air Terjun Simoko baru kita cari-cari bagaimana itu menghasilkan kan masih apa masih bisa dikatakan gratis kalau misalkan masuk itu nda dipungut biaya.
W	Itu yang mau urus Pokdarwis lagi kak?
I	Pokdarwis. Aduh ini Kak Wahid juga nda na angkat
W	Aman-aman Kak. Oiya pak itu BUMMAS rapatnya per 5 tahun atau bagaimana pak.
S	Saya juga nda tau, karena kalau saya keluar kampung nda tau.
I	Kehutanan di'? Angkatan berapa?
W	2020 sama Muammar satu kelas kak.
I	Ada ini Syahrul Angkatan 2016 sekarang kerja di Lingkungan Hidup bisa

	ditanya.
W	Sepertinya saya tahu orang itu kak. Cuma nda ada nomornya di saya. Tapi dari kelurahan sendiri tidak ada semacam evaluasi untuk BUMMAS pak?
S	Tidak.
I	Tidak, itu hanya pembahasan-pembahasan lari itu kalau ada apa itu pembahasan satu kali ... Musrembang.

Transkrip Wawancara bersama Perwakilan POKDARWIS 1 dan 2

Waktu wawancara: 7 Juli 2024

Perwakilan huruf dalam wawancara:

A: (Perwakilan POKDARWIS 1)

I: (Perwakilan POKDARWIS 2)

W: (Wening-Pewawancara)

A	Dia bukan unit usahanya BUMMAS. Memang kemarin ketika mau revitalisasi, LPM ngotot mau kasih masuk Pokdarwis ke unit usahanya BUMMAS. Tapi saya tidak mau karena memang Pokdarwis tidak ada sangkut pautnya BUMMAS dengan LPM. Murni swadaya pemuda. Jadi saya tidak mau, berhasil ada yang mengklaim toh. Karena banyak tawaran proyek masuk di Campaga Pokdarwis. Nah itu mi yang, melalui Pokdarwis, harus melalui Pokdarwis. Mangkannya tidak mau ada yang diatasnya Pokdarwis karena banyak penyelewengan anu toh, kekuasaan. Pernah itu lama, berapa hari itu, bahkan sampai didatangkan itu tadi Suyuti.
I	Ketua BUMMAS dulu di'?
A	Hu'um. Jadi Pokdarwis dan BUMMAS itu ada MoU-nya, perjanjian kerjasama, bagi hasil.
W	Berapa bagi hasilnya kak?
A	Dia 3%/tahun
W	Untuk BUMMAS? Sisanya?
A	Pokdarwis.
W	Lalu untuk pembentukan Pokdarwis itu tujuannya bagaimana? Atau kayak siapa yang menginisiasi?
A	Dia kan karena kemarin kita itu ada pagelaran ADWI toh, desa wisata. Sementara disitu, dua organisasi yang bisa terlibat, BUMDES dengan Pokdarwis. Tapi kan itu mi kita kelurahan, ndak ada BUMDES jadi BUMMAS mi. sementara BUMMAS kemarin, kayak ndak terlalu aktif-i toh, tidak bisa nakoordinir semua kegiatan. Mangkannya Pokdarwis dibikinmi Pokdarwis.
W	Dari awal kakak ketuanya?
A	Bukan
W	Siapa?
A	Lukman
W	Itu per apa pergantian ketua?
A	Cuman karena kemarin ketua yang pertama itu baru satu semester. Iya sekitar 6 bulanan I, menyerah-i. Anu, dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri, akhirnya teman-teman anu mi, adakan pertemuan, nanti datang Kadis Pariwisata toh. Dia bilang mi, disepakati mi teman-teman bahwasannya ada Ketua PLT toh.

W	PLT itu apa kak?
A	Ceritanya itu pejabat sementara. Sampai 2 tahun itu selesai. 2022 saya jadi disitu sampai kemarin 2024. 2000 berapa itu ada anak KKN terakhir?
I	2023 akhir
A	2024 awal bulan-bulan 2 diadakan lagi, kan berakhir jabatan toh. Diadakan lagi pemilihan. Direvitalisasi kembali.
W	Tapi untuk Pokdarwis sendiri kak, menetapkan seberapa banyak hutan desa yang digunakan atau bagaimana?
A	Oh tidak ji. Kita di Pokdarwis kalau bisa kita eksplor itu semua hutan. Karena kan hutan ini ada objek-objek menyebar toh, jadi ndak bisa kayak ada batasan lokasi itu. Berapa luasannya itu?
W	23 hektar
A	Ceritanya kan bagi hasilnya itu bukanji juga kayak objek wisata di luar kawasan hutan. Khusus ji saja paket yang ada di hutan itu. Dan tidak ji bilang dia di semuanya, tidak ji. Kayak Wisata Munyu'-Munyu'nya teman-teman, river tubing-nya itu kan masuk di kawasan hutan jadi sama apa namanya trekking hutannya, situsnya kan itu di dalam hutan semuanya dikarenakan dia perbatasan pemekaran toh.
W	Di MoU ini tertulis pembahasan 3 persen atau cuma
A	Ndak ada, Cuma bagi hasilnya ji, bilang sekian persen.
W	Oiya maaf kak, divisi apa saja yang ada di Pokdarwis?
A	Bidang-bidangnya, apa di?
I	Lupa tongi kak? Lupa tong
A	Ada empat kayaknya deh. Ada di sekret itu belah. Butuh dokumentasi strukturnya kah?
W	Atau punya dokumen SK Kak?
A	Ada di rumah.
W	Atau nanti saya minta nomor hape saja ya kak.
A	Oh bisaji.
W	Lalu ini kak, kan hutan desa izinnya 35 tahun, sekarang kan sudah jalan 14,5 tahun. Bicara soal keberlanjutan hutan desa, hingga kini seberapa ketergantungan Pokdarwis ke hutan desa?
A	Oh, ya kalau kami sih uhm berharap diperpanjang sih nanti. Karena kan mau tidak mau kita sudah ada aktivitas di situ. Jangan sampai ada aturan lagi yang kita melanggar toh. Karena kan tahu sendiri kita kan di desa, baru masyarakat taunya kita pernah tidak dilarang, pernah diizinkan begitu. Tiba-tiba aturan keluar kita dilarang kan akan terjadi konflik. Jadi kalau harapan saya sih, semoga nanti berakhir, ndak berakhir, ada upaya perpanjangan begitu. Karena sudah banyak aktivitas di dalam.
W	Nah kalau dari peraturan tentang perizinan hutan desa, yang berhak untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan desa itu kan BUMDES/BUMMAS. Nah kalau kedepannya apakah Pokdarwis memiliki rencana untuk ikut memperbaiki BUMMAS atau bagaimana?
A	Untuk apanya itu?
W	Untuk kedepannya, katakanlah mau memperbaiki BUMMAS. Apakah Pokdarwis ada gambaran untuk ikut memperbaiki BUMMAS?
A	Yah, kalau BUMMAS ingin mempertahankan ya kita bantu dari Pokdarwis.

	Mangkannya saya tidak mau masuk unit usahanya BUMMAS. Karena kapan BUMMAS ceritanya ada hal-hal tertentu toh. Karena kan ini organisasi yang seharusnya memang sejalan, mau disatukan, baru pengurusnya kan ini sama-sama apa namanya, sama-sama mau bergerak begitu. Mending kerja sama. Supaya tidak ada saling mengganggu toh.
W	Lalu kak, apakah Pokdarwis pembatasannya untuk anak muda? Untuk keanggotaan?
A	Untuk keanggotaan sih kami tidak ada batasan, selama dia berdomisili di sini. Cuman ya yang paling banyak tertarik untuk bergabung sih yah anak-anak yang usianya muda. 30-an.
I	Ndak muda mi.
A	Ceritanya masih ini lah.
W	Terus, kalau rencana kedepannya Pokdarwis apa yang mau dikembangkan?
A	Wisata, wisatanya yang ada di dalam hutan itu. Kayak Edukasi Sekolah Rimba sama River Tubing yang di dalam kawasan itu.
W	Lalu kak, apakah dari Pokdarwis itu sendiri cukup berkomunikasi dengan KPH atau dari pihak kehutanan?
A	Lumayan sih, karena setiap ada kegiatan yang mau kami adakan, kami pasti konsul ke KPH.
W	Ke siapa kak? Penyuluh atau polhut?
A	Endak langsung, kami langsung ke kantornya di ini.... Karena ndak ada mi, ditarik semua ke provinsi to. Di Bantaeng ini kan cuma namanya, apa nama...KPH nya ya. Kehutanannya di provinsi mi di'! Kami kesanaji.
W	Apakah perlu izin dari BUMMAS kak?
A	Endak ji, kecuali ada kegiatan yang apa namanya kayak mau merubah bentuk toh. Nah itu kan kita konfirmasi di sana, kalau misal disana diijinkan, kami kembali ke BUMMAS lagi. Meskipun di san diizinkan tapi BUMMAS bilang jangan, kami endak. Tapi tetap Keputusan akhirnya di BUMMAS akhirnya.
W	Merubah ini, pernah merubah atau
A	Endak, ndak pernah. Cuman kan hutan tidak boleh dijamah sama sekali. Kayak kta mau pasang-pasang penanda pintu gerbang, papan-papan peringatan, itu kan kit acari tempat terus cor tiangnya. Intinya sih di Pokdarwis sebisa mungkin komunikasi hal-hal sekecil apapun yang kita lakukan terkait hutan itu pasti selalu kami upayakan selalu konsul dengan BUMMAS. Karenakan kita Cuma, bukan punya kuasa. Istilahnya kita Cuma minjam, kalau tuan rumah tidak mengijinkan ya apa boleh buat.
W	Berapa dominan laki-laki terhadap perempuan di Pokdarwis?
A	Kalau, sama saja sih sebenarnya.
W	Berapa jumlah anggota Pokdarwis kak sekarang?
A	Sekarang sisa 14 orang. Karena banyak apa namanya, bukan bertambah malah berkurang karena banyak yang dapat pekerjaan di luar. Ada yang jadi penetu, ada yang kerja di Perusahaan, ada yang perantau, ada yang pindah domisili, nikah.
W	Upaya Pokdarwis sendiri untuk mempertahankan anggotanya bagaimana Kak?
A	Anu sih, kalau saya sendiri itu perbanyak unit usaha, binaan toh. Supaya semua anggota itu kita jadikan pengurus, kayak ada tanggung jawabnya. Jadi tergantung dari mereka mami yang dkasih kepercayaan urus unit usaha.

	Apakah mereka mau berkembang atau tidak. Kita usahakan anggota mandiri lah.
W	Kan pasarnay Pokdarwis ini anak muda kak, bagaimana Pokdarwis dengan Karang Taruna kak?
A	Karang Taruna di sini lagi vakum. Baru pengurus lama Karang Taruna, itu-itu tok ji jadi pengurus Pokdarwis. Ceritanya anu, teman-teman tidak mau ribet mengurus dua lembaga. Jadi teman-teman fokus mengurus satu, ya satu saja yang penting aktif toh.
W	Maaf kak, untuk LPM. Apa pengaruh pendapat LPM pada kelembagaan di sini?
A	Kalau saya pribadi, bahkan saya kadang terkaget bilang apa keanggotannya LPM. Karena LPM selama ini itu aktif ji kalau rapat-rapat MUSREMBANG. Kalau dibilang ki mau membina masyarakat secara langsung. Kurang-i. karena memang kemarin itu waktu revitalisasi lembaga yang ada di kelurahan. LPM, satu-satunya lembaga yang tidak direvitalisasi itu LPM. Karena tidak mau. Karena saya yakin-a, kalau dia mau buka jalan untuk revitalisasi, ketuanya itu bakal digantikan, karena itu dia tidak mau. Kayak kerja-kerja-ki, lewat-lewat-ki, baru dia kan digaji, kita Pokdarwis tidak.
W	Digaji sama kecamatan?
A	Digaji sama pemerintah, ada dianggarkan sama kelurahan gajinya. Sementara kita di Pokdarwis kalau mau adakan kegiatan harus berusaha sendiri. Cuma itu saya akui semangatnya teman-teman toh. Memang luar biasa, ndak pernah berharap sama anu.
W	Berarti LPM ini signifikan atau tidak untuk hutan desa sebenarnya?
A	Ndak tau ma saya kalau soal itu.
W	Tapi kalau dia memberikan arahan, apakah memang harus diiyakan atau bagaimana?
A	Uhm, ndak juga sih karena bagaimana itu, kami ndak terlalu dekat dengan LPM. Kami Pokdarwis dekatnya dengan dinas dan lurah. Kalau lembaga diluar itu ya BUMMAS, karena kami kerja sama kan. Kalau LPM sih ndak teralu ini, padahal kan LPM yang harusnya menojol. Ini kan kita juga lurah toh, bukan desa.
W	Nah itu kak, Dinas Pariwisata support apa sejauh ini?
A	Paling bersifat apa namanya
I	Non-material
A	Iya, kayak ini saja kayak bagaimana di', lebih ke tempat konsul-i kalau ada kegiatan kepariwisataan gitu. Kalau ada kegiatan konsul ke mereka, minta arahan. Kalau dibilang materi, ndak ada sih. Peralatan juga tidak. Betul-betul mandiri.
W	Tadi dijelaskan kalau DLHK mau mendukung Pokdarwis ya kak?
A	Iya karena kami sekarang ikut ini pagelaran program iklim. Jadi otomatis kan kita konsul ke sana.
W	Ini yang mengurus pagelaran ini kapan kak?
A	Tahun ini, baru bulan 8 nanti. Baru-baru ini verifikasi nanti bulan 8 pengumuman.
W	Ini sama ya kak, DLHK sebagai tempat konsul?
A	Sama...iya konsul. Sama kayak kita mau adakan pemeliharaan hutan desa.

	Kita Pokdarwis dan BUMMAS kan kayak minta ide kesana, penghijauan disana, sama kayak kamimau ada kegiatan iklim, kami meminta disana. Itu ji.
W	Kalau dari BUMMAS sendiri apakah ada kesulitan berkomunikasi kesana?
A	Anu-i, sejauh ini kendalaku dengan BUMMAS, kayak perjanjian. Makna perjanjian kerja sama ini, BUMMAS kurang paham. Mereka serahkan semuanya ke Pokdarwis, itu yang kutangkap saya. Kaya contoh misalkan, papan-papan larangan, ceritanay Pokdarwis konsul ke dinas toh, terus dinas dapat ceritanay dari, bantuan pengadaan sarana papan larangan di hutan dari Mandiri. Kami ambil di sana, ini kan mau dipasang beberapa titik di hutan. Ini kami kesulitan, sampai sekarang itu belum dipasang papan-nya. Karena sampai sekarang ndak ada orang BUMMAS yang mau bantu kami pasang papan-papan itu. Kalau kayak begitu toh, yang merubah bentuk hutan, memang harus melalui BUMMAS temani. Karena tidak bisa dipungkiri, hutan ini sacral, hutan ini angker toh. Ndak sembarang orang yang masuk. Itupun kalau ada pengunjungku dari luar, ya Perempuan, anak-anak, pasti kami mabil pemandu itu dari BUMMAS. Sebisa mungkin ketuanya, kami jadikan tour guide. Karena ndak bisa-i, takut salah-salah anu.
W	Kan ini yang bisa masuk orang-orang tua kak, bagaimana ini regenerasinya kak?
A	Sementara ini sih, seiring berjalannya waktu, setiap ada tamu toh, kita berjalan bersama sambil belajar. Jadi yah, akan tiba saatnya, kita bisa mandiri juga. Tapi sekarang kalau masih ada waktunya BUMMAS dan bisaji toh. Kami sebatas jadi siswaji saja, kecuali kalau merka sudah tidak bisa. Karena tidak bisa merasa bisa ma, ndak usah deh pakai BUMMAS. Ceritanya kita harus hargai orang toh, begituji. Supaya namanya komunikasi berjalan terus, itu yang kami jaga selama ini. Sebisa mungkin tidak ada kata-kata yang menyakiti. Kemarin waktu revitalisasi itu aneh. Kubilang ke Pak Rahman, "Hati-hati ki, AD ART ta, ndak boleh masuk BUMMAS kalau di luar Kelurahan Campaga, sementara Puang (Ketua LPM) kasih masuk menantunya sebagai ketua KUPS Air Bersih" Menantunya orang Desa Bonto-Bontoa, bilang "Hat-hati'ki, untung saya tidak keras Pak Rahman, bisa kenak pidana ini. Kita ketuanya. Lusa ada masalah, LPM apa ji toh?", Bilang-i Pak Rahman, jangan mau diatur. Kubilang kenapa itu ndak mau saya dibawah BUMMAS, karena bantuan itu banyak sekali berjalan sendiri ke Kelurahan Campaga. Jangan sampai hilang kesempatannya, orang lain kaya. Sementara organisasi ta mati. Kalau kita juga mau jalankan ini aturan, Erbol Ertop harus ada pajaknya. Selalu saya katakan, BUMMAS ini harus keras. Karena kan mereka yang beri izin. Tidak bisa mereka membangun, kalau tidak ada kerja sama dengan BUMMAS. Karena itu Pokdarwis, saya wanti-wanti, lengkapi dokumen sewaktu-waktu Pokdarwis banyak project-nya toh, jangan sampai ada, yang tidak ditau mansuia toh. Ada masalah besok, lihatkan MoU, sekian punay saya sekian punya kamu. Jadi kan enak toh. Sampai sekarang punya-nya Erbol sering diminta menghadap ke Kapolres. Alasannya pencemaran air. Harusnya yang urus ini BUMMAS, kalau BUMMAS bilang aman, aman ma'. Jadi tidak perlu langsung toh, tapi ndak mau itu. Banyak masalah dulu itu. Kurang anu BUMMAS, kurang keras ki. Butuh revitalisasi nah mau mengundurkan diri ketua-nya. Tapi ndak bisa mi.
A	Jadi isu regenerasi di BUMMAS cukup sulit ya kak.

W	Anu-i, ada oknum yang tertutup. Kita di Pokdarwis baru ada MoU sama BUMMAS, baru kami sambil belajar sama Pak Rahman. Karena perlu belajar, karena buta-buta juga, karena tidak tahu informasi toh tentang hutan. Istilahnya masih baguslah komunikasi.
---	---

Transkrip Wawancara bersama Perwakilan Balang Institute 1&1

Waktu wawancara: 9 Juli 2024

Perwakilan huruf dalam wawancara:

J: (Perwakilan Balang Institute 1)

H: (Perwakilan Balang Institute 2)

W: (Wening-Pewawancara)

W	Bagaimana Balang Institute melihat potensi Hutan Desa Bantaeng dan memutuskan untuk memberikan secara fasilitasi dan lebih tepatnya memberikan pengembangan kapasitas kelembagaan sampai membantu inisiatif pembentukan hutan desa?
J	Kak Hasri bisa, halo Kak Hasri Mute anu ta kak, mic ta'.
H	Ya, soal Balang dulu ya, Balang itu berangkat dari namanya dulu, kenapa disebut Balang sendiri, yaitu Sahabat Alam Banteng bukan Bentang Alam ya!
W	Iya-iya Pak, haha!
H	Nah terus, sebenarnya diawal inisiasinya itu bukan dari Balang. Di 2009 ke 2010, kan Balang diinisiasi tahun 2010, proses inisiasi hutan desa sendiri itu saya lihat prosesnya, start-nya di 2009...ada UNHAS, ada RECOFTC dan pemerintah Kabupaten Bantaeng sendiri. Nah itu, mungkin soal waktunya belakangan baru Balang terlibat dalam kegiatan kita. Aktif dalam diskusi-diskusi, baik diundang maupun tidak. Jadi saya sebagai ...kebetulan tinggal di sini di Labbo', sering melibatkan diri sebagai warga desa gitu. Itu awal-awalnya yah. Belakangan, berdirinya Balang sendiri sudah mulai, kan diawal ini Balang kegiatannya adalah kegiatan yang benar fokus pada apa ya...isu-isu lingkungan. Tapi kita masih fokus pada advokasinya gitu, terus putaran-putaran diskusi untuk proses kaderisasi di desa-desa. Jadi kita bangun simpul-simpul di desa, bagaimana supaya warga des aitu tetap peduli pada lingkungan sekitarnya, gitu awalnya. Lalu kemudian, saya lupa persis tahun berapa itu, Balang secara organisasional sudah mulai diajak untuk bergabung di kegiatan-kegiatan yang kependampingan RECOFTC. Begitu...begitu Mbak. Jadi kalau pertanyaan yang dari list pertanyaan itu, ada saya melihat sepenuhnya tentang RECOFTC. List pertanyaan-pertanyaan itu...kalau ini tadi saya sempat kontak Direkturnya RECOFTC di Jakarta, bahkan meneruskan list pertanyaan itu, minta...karena kami tidak mungkin berspekulasi ya, aah menjawab pertanyaan yang notabene pertanyaan itu untuk RECOFTC. Kecuali pertanyaan-nya yang dibagikan ke berapa ya,...aah bagaimana setelah RECOFTC mensupport seperti apa sekarang, ahh sebenarnya itu kan...faktanya sekarang di desa, LPHD-nya seperti yang saya bilang ke Mbak Ning kemarin datang ke rumah bahwa upaya-upaya lembaga, entah itu lembaga donor, entah itu lembaga-lembaga pendamping, itu sudah cukup maksimal! Sisa kemudian pemerintah desa atau orang yang didatangi bagaimana merespon itu. Nah faktanya kan, seperti itu. Atau bagaimana lah mau dikembangkan diskusinya. Saya berbicara faktanya dulu, seperti itu Mbak.

W	Makasih Pak! Saya juga baru sadar Pak, kalau saya salah kirim. Jadi memang Pak, yang ini list-nya hampir sama. Ini template pertanyaan sebenarnya Pak. Harusnya RECOFTC saya ganti jadi Balang. Saya minta maaf Pak kalau itu. Lalu yang untuk RECOFTC sendiri itu Pak, sudah sama Pak Gamma diarahkan ke Ibu Lissa. Tapi Bu Lissanya sedang ada cuti dan tanggal 17 baru bisa Pak. Gitu....
H	Uhm yah, saya tidak kontak Lissa tadi karena saya ngomong ke direktornya aja ahahaha.
W	Ahhaha! Ah iya Pak, untuk awal pembentukan hutan desa itu Pak, bagaimana bentuk kelembagaan hutan desa itu sendiri Pak? Kalau saya lihat di beberapa profil desa itu ada yang namanya LPM, LPHD dan kemudian BUMDes, nah itu kemudian bagaimana pada awalnya desa maupun kelurahan ini membentuk kelembagaan? Atau kan awalnya itu pasti masih sederhana ya Pak baru ketika sudah ada hutan desa, ada perubahan bentuk kelembagaan. Entah itu penambahan kelembagaan atau bagaimana? Nah itu bagaimana Pak, diawal-awal desa itu sendiri? Atau di kelurahan? Kan ini ada desa ada kelurahan? Bagaimana bentuk kelembagaan ini Pak?
H	Yap, seperti yang lain di desa. Di Labbo' itu sendiri ada LPM, sebenarnya kan BUMDes duluan ketimbang hutan desanya gitu. Akan tetapi merujuk pada peraturan yang memungkinkan.... Kan awalnya itu, teman-teman inisiator itu entah dari UNHAS dan yang lain menginginkan dibentuk LPHD, namun pada waktu itu...seingat saya, karena saya belum terlibat, tidak terlibat sebenarnya. Balang dalam hal ini belum aktif dalam pembentukan LPHD gitu. Namun karena BUMDes ini yang secara administrasi paling lengkap dan juga BUMDes ini dimungkinkan menjadi lembaga pengelola hutan desa, menurut Peraturan Menteri Nomor 49 kalau tidak salah tahun 2009 dikoreksi saja bila salah. Itu memungkinkan BUMDes. Nah akhirnya, pada momentum pertemuan dengan Pemkab, inisiator dan masyarakat lahirnya kesepakatan BUMDes saja. Daripada kita bentuk yang baru mending BUMDes saja yang dikelola dan BUMDes itu membentuk satu unit usaha, yang namanya unit usaha hutan desa. Nah, untuk kelurahan sendiri juga sama, ada LPM ada apa namanya LKMD dulu. Nah terus karena di Campaga ini tidak ada BUMDes, uhh juga masyarakat bersama Pemkab di kelurahan itu berinisiatif membentuk Badan Usaha Milik Masyarakat namanya BUMMas, ini mungkin mereplikasi yang ada di desa. Karena kan BUMDes ahh apa yah tidak ada aturan, rujukan peraturan yang mengatur bahwa Lurah itu dimungkinkan untuk membuat suatu lembaga yang namanya BUMDes karena beda ki, ada PP 72 atau PP berapa yang mengatur saat itu. Akhirnya bersama dengan Dinas PMD waktu itu, maka diinisiasilah Badan Usaha Milik Masyarakat yang mengelola, yang diberikan hak kelola di Kelurahan Campaga. Seperti itu Mbak kronologinya terbentuknya.
W	Oiya Pak.
H	Kalau di Labbo' sendiri itu, nyaris bahkan tidak ada penambahan organisasi di desa atau lembaga desa yang ada. Dia internalisasi kah mungkin namanya atau apa ya? Atau memanfaatkan atau menggunakan lembaga yang ada di desa dalam hal ini BUMDes, begitu.
W	Yang saya tanyakan lagi itu Pak, terkait Campaga. Berbeda send.... Bentuk

	pemerintahannya kan berbeda Pak, yaitu kelurahan, kalau di Desa itu kan ada namanya ADD, kalau di kelurahan kan tidak ada. Nah itu bagaimana, apa kayak yang diawal pembentukan BUMMas itu sendiri, bagaimana diharapkan finansialnya BUMMas itni bisa berjalan Pak? Karena kan beda seperti yang di desa, mereka punya back up ADD tap ikan kelurahan tidak ada, nah itu bagaimana Pak yang dipikirkan waktu itu?
H	Kan relatif sama sih waktu itu, di 2010 itu kan belum ada Undang-Undang Desa. Belum. Jadi dana desa itu, anggaran di desa itu relative sama dengan anggaran di kelurahan. Kurang lebih samalah itu, belum ada dana desa, belum ada transfer daerah, yang ada itu hanya bagi hasil pajak daerah gitu. Yah kisarannya yah 250 juta-an lah per tahun. Nah, harapannya untuk finansial sebenarnya itu kan BUMDes apa yah, hutan desa itu sendiri kan ada potensi-potensinya. Melihat BUMMas ada potensi yang bisa dikelola ini harapannya yah yang saya lihat waktu itu, bisa mengembangkan ekonomi sektor itu. Ada jasa lingkungan, sebenarnya kan di Campaga itu disana itu di Hutan Desa Campaga...sumber, salah satu sumber mata air PDAM di Kabupaten Bantaeng gitu. Jadi dari list atau dari identifikasi potensi yang ada di Hutan Campaga itulah yang teman-teman lihat, berkesimpulan bahwa di sana ada potensi yang bisa dikembangkan secara ekonomi gitu. Kalau misalkan di hutan desa Labbo' dan Patteneteang itu kan HHBK-nya adalah kopi. Ada potensi yang lain juga rotan, ada potensi jasa lingkungan juga tapi ini belum terkelola. Pun demikian dengan Campaga di sana kan ada potensi ekonomi yang dalam hal ini jasa lingkungan air. Namun, ini mungkin yang yang belum terkelola. Jadi berangkatnya dari situ mungkin alas pikirnya bahwa BUMMas ini bisa bergerak dengan memanfaatkan potensi yang ada di Hutan Desa Campaga.
W	Oiya baik pak, kemudian ini lanjutan untuk di Balang sendiri ya Pak, seberapa lama.... Kan sampai sekarang masih mendukung hutan desa. Apakah di Balang sendiri memiliki semacam timeline terkait kayak pembangunan hutan desa ini Pak? Misalkan tahun sekian ke sekian program ini atau bagaimana? Kan ketika.... Kan itu kalau tidak salah RECOFTC berhenti secara finansial tahun 2017, nah itu apakah, bagaimana Balang di fase-fase itu Pak? Apakah ada perbedaan program ketika ada RECOFTC dan setelah tidak adanya donor?
H	Ya tadi 2017 itu relatif akhir uh 2017 ini kan fase out daripada RECOFTC untuk mensupport secara finansial, secara kegiatan ya Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng. Balang sendiri tidak ada timeline yang khusus untuk hutan desa ya, jadi kita itu, teman-teman lebih pada kegiatan-kegiatan yang sebelum hutan desa juga itu kita kan interaksinya dengan masyarakat sekitaran hutan desa. Akan tetapi perhatiannya terhadap hutan desa itu kita melihat bahwa ini ada sesuatu yang telah dimulai, yang menurut Balang ini adalah sesuatu yang menguntungkan bagi masyarakat karena memberikan akses legal untuk mengelola kehutanan. Maka kami tetap memperhatikan itu, tentu dengan supporting seadanya ya. Supporting yang saya maksud itu karena Balang juga bukan lembaga donor yang tidak mempunyai kepastian finansial untuk mensupport kegiatan-kegiatan itu maka begitu ada program-program yang berkaitan dengan hutan desa atau kadang-kadang kita membuat, ketika ada program yang masuk kita selalu mendorong bahwa ini loh yang penting untuk diperhatikan. Tapi pada saat itu, yang nyaris apa yah, Pemkabnya sendiri kan mestinya itu fokus memperhatikan ini. Nah dengan adanya

	BUMDes harapannya bisa melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh RECOFTC pada saat itu. Karena secara kelembagaan sudah terbentuk, BUMDes sendiri sudah disupport anggaran, namun sekalipun anggaran ini untuk penguatan modal. Nah pada saat itu di hutan...nah aktifitas, kan ini baru dimulai aktifitas menanam kopi. Kalaupun sudah ada, namun masih belum masif. Jadi, balang sendiri sebenarnya itu tidak memprogramkan khusus, tapi setiap saat ketika ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hutan desa, kita dorong kesana. Nah seperti itu Mbak.
J	Yah, betul! Sorry ini saya sedang di rumah sakit jadi agak ribut. Uhh, ini yang dijelaskan Kak Hase soal antara hutan...kan ada dua nih...sebenarnya ada tiga yah Kak?
H	Iya
J	Fokus dampingan di Bantaeng, ada Hutan Desa Patteneteang, kemudian Labbo' dan Campaga. Nah secara potensi cukup berbeda, kalau di Labbo' hutan desanya bisa ditanami, yang di Campaga ini yang agak-agak ini, karena ada kepercayaan lokal, uhh yang hutannya tidak bisa, tidak bisa diganngu. Ada kepercayaan lokalnya, nah untuk penguatan sendiri pasca RECOFTC.
H	Oh iya!
J	Di 2019, yah mencoba untuk memfasilitasi yang Mbak Wening bilang bagaimana soal akses pendanaan atau finansial penguatan lembaga-lembaga yang punya inisiasi di Labbo' dan Campaga. Nah memang secara, karena kita ada inisiasi sebenarnya. Kalau secara dampak, di Labbo' sudah yang dipastikan sejak awal pengolahan kopi, penguatan sumber daya manusia, kelembagaan dan akses pasar. Menurutku agak-agak sudah terbangun ya kak, kalau akses pasar kopi. Itu sudah bisa berjalan mandiri baik ditingkat komunitas maupun petaninya, kemudian di Campaga secara kelembagaan BUMMas di Campaga itu agak ini memang, masih lemah karena uhh faktornya juga itu kan, di kelurahan itu tidak didukung secara ini...beda dengan BUMDes uhh ada penguatan modal dan lain-lain. Tetapi dampak yang ada pemerintah kabupaten memiliki perhatian yang khususterutama soal pengembangan wisatanya. Mangkannya di Campaga itu yang lebih berkembang itu soal pengembangan wisata alamnya, begitu Mbak. Kenapa saya bilang dampak, karena Balang masih dilibatkan soal perencanaan didalamnya. Soal pengembangan wisata, misalnya orang-orang Pemkab minta referensi di Balang atas apa yang sudah dibangun sebelumnya. Mungkin begitu Mbak Wening.
W	Baik Kak makasih. Saya mau follow up dari Pak Hasri, katanya kan harapannya masyarakat bisa meneruskan prpgram-program yang telah ditinggalkan sama RECOFTC. Ini kira-kira programnya apa saja bapak?
H	Diawal sih RECOFTC itu lebih ada fasilitasi lahirnya ini SK dan yang lain. Nanti belakangan masuk baru ada membantu masyarakat membuat perencanaan. Bagaimana sih, membuat perencanaan syarat tanah, begitu. Itu di fase berikutnya. Kalau yang awal itu kan RECOFTC ini lebih banyak bersama-sama dengan UNHAS. Salah satu orang UNHAS yang terlibat aktif itu Pak Alif, Pak Supratman. Seperti itu Mbak. Aktifitas yang dulu RECOFTC lakukan kan lebih pada fasilitasi pertemuan-pertemuan, kemudian apa yah, kan ini lahir, sudah terbit SK ceritanya nih. Berarti hak kelola sudah ditangan

	warga, aturan-aturan lokalnya sudah ada di BUMDes, mestinya ini secara organisasional bisa berjalan dengan baik. Ketika semua itu berjalan, normal, uhh belakangan itu RECOFTC masuk lagi. Kan dulu itu pergantian kepemimpinan dan mungkin barusan lagi ada programnya yang masuk di wilayah Sulsel dalam hal ini di Bantaeng. Nah RECOFTC itu lewat Mbak Lissa, bersama dengan Mbak Lissa itu melakukan apa yah, penguatan-penguatan kapasitas – misalnya belajar bersama membuat perencanaan, terus menelusuri akses pasr untuk petani dan komunitas. Seperti itu yang dilakukan RECOFTC belakangan. Harapannya kan itu bisa dilanjutkan. BUMDes sebenarnya melanjutkan seperti yang saya sampaikan, bahwa BUMDes melanjutkan dengan membangun kerja sama dengan salah satu Perusahaan, yang membuat demplot di desa. Seperti itu Mbak.
W	Terima kasih, lalu pak yang ingin saya tanyakan itu.... Oiya Pak, kan tadi Kak Junaedi menjelaskan kalau Pemkab itu minta rujukan ke Balang. Nah kebetulan yang saya lihat itu, di Campaga yang mengerjakan itu Pokdarwis. Jadi, apakah ada semacam hubungan antara Pokdarwis dan Balang? Apakah Pokdarwis juga meminta saran ke Balang atau kayak bagaimana ini Kak? Atau memang Balang ke Pemkab lalu Pemkab memberikan semacam kayak perintah ke Dinas Pariwisata terus turun ke desa atau turun ke kelurahan atau bagaimana Kak?
J	Diskusi dengan Pokdarwis 2022 kalau tidak salah. Kami kesana bikin perencanaannya. Tapi sebenarnya itu masih, uhh basis pengajuan proposal uhh untuk penguatan teman-teman Pokdarwis rencana ya. Yang mau diisi itu hari, Dana Nusantara yah. Dan sementara mau buka, uhh kita diskusi bareng terus kemudian kayaknya di dorong ke Campaga. Nah kami itu bikin diskusi sama teman-teman Pokdarwis, tapi tidak berlanjut. Nah soal, soal apalagi nama Kepala Dinas Pariwisata Kak?
H	Ibu Harmoni
J	Ibu Harmoni, uhh permintaan presentasi soal data-data potensi di Campaga. Ini yang kami maksud sebagai rujukan.
W	Oooh!
H	Support ini lebih ke data-data potensi yah. Putaran diskusi.
W	Oiya Pak, saya mau tanya satu kali lagi Pak. Di Desa itu kan ada LPM. Sejauh mana sih Pak.... Apa perbedaan LPM dengan LKHD? Dan seberapa besar pengaruh LPM terhadap hutan desa atau pengaturan hutan desa? Kan yang memiliki izin kan BUMMas maupun BUMDes, nah ini LPM sebagai apa ya Pak?
H	Bagaimana itu posisinya LPM itu Edi? LPM ...LPM. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kan.
J	Dia kan bertindak sebagai perencanaan , apa yah itu kayak MPR?
H	Saya kurang paham soal itu. Sebenarnya kan tidak ada keterkaitan langsung yah. Jadi dua hal yang berbeda, LPM dengan LPHD. Itu dua hal yang berbeda, LPHD itu Lembaga Pengelola Hutan Desa, kalau LPM itu tubuh..lembaga yang memang menjadi bagian dari perangkat desa. Yang wajib ya?
J	Iya itu yang saya tahu. LPM itu di....
H	Sama seperti.... Hampir di semua desa, tidak jelas apa yang mereka kerjakan ya.

J	Hanya formalitas sebenarnya kalau uhh LPM. Dalam perangkat desa itu ya kayak BPD.
H	Yaah DPD.
W	DPD itu Badan Penanggulangan Bencana atau apa?
H	Bukaann, Badan Permusyawaratan Desa. BPBD yang penanggulangan bencana itu.
W	Oiyaiya Pak! Nah itu memiliki hak ini juga kak di pengelolaan hutan desa? Semacam kayak pengaruh atau bagaimana?
J	Yang mana itu?
W	Yang LPM.
J	Yang punya kaitan langsung dengan hutan desa hanya ini lembaga pengelola hutan desa-nya. Lembaga-lembaga yang lain kan uhhh seperti yang Kak Hasri bilang sebagai bagian dari mitra dan perencanaan anggaran desa dan lain-lain. Dan untuk semua desa, LPM dan DPD itu perangkat yang wajib ada, kelembagaan yang wajib ada.
W	Oh baik-baik Kak. Karena sempat wawancara juga di Campaga, nah itu sedikit ada, semacam ada...LPM nya cukup dominan mengambil keputusan terkait hutan desa. Karena itu mau saya tanyakan. Kan dari mereka sendiri juga kurang paham apa fungsi dari LPM itu sendiri. Katanya mereka juga kurang beraktifitas selayaknya namanya begitu Kak.
H	Kalau di Kelurahan itu iya, LPM itu sama posisinya dengan mirip dengan DPD sebagai mitra di kelurahan. Kalau di kelurahan kan beda lagi. Dia kan kepala pemerintahannya itu jabatan struktural kan ditunjuk oleh yang lebih di atasnya. LPM nya itu kalau di kelurahan itu mirip-mirip dengan DPDnya di desa.
W	Oh iya-ya paham-paham. Oh saya mau tanya lagi mungkin ini yang terakhir kak..pak. Balang itu seperti KPH. Kan kalau DLHK itu yang mengatur perencanaan dan KPH itu yang teknis. Yang saya lihat itu sama, RECOFTC yang merencanakan, Balang yang bagian teknis. Nah di Balang itu sendiri apakah ada laporan progress di hutan desa itu sendiri, karena kalau say alihat di web itu, yang ada itu hanya di web-nya RECOFTC tentang kopi. Apakah di Balang sendiri ada semacam dokumen atau pernah upload dimana atau bagaimana kak terkait hutan desa?
H	Ya Edi, jawab Edi.
J	Kalau dokumen-dokumen, kalau laporan-laporan program pasti iya. Lebih kesitu, misalkan ada kegiatan dengan RECOFTC dan Balang menyiapkan laporan. Kemudian, dokumen-dokumen pendukung yang kalau Mbak Wening maksud misalnay dokumen LPHD yang berkaitan dengan LPHD itu ada di Balang ya Kak.
W	Dokumen LPHD ini izin atau bagaimana Kak?
J	Apa itu namanya Kak, yang dokumen-dokumen dari hal yang pengelolaan hutan desa?
H	RKHD, Rencana Kerja Hutan Desa.
J	Rencana Kerja Hutan Desa, nah dokumen-dokumen itu yang ada.
H	Bukan produk kita itu. Itu produk teman-teman dari yang membantu memfasilitasi dulu. Salah satunya terakhir dulu dari RECOFTC, UNHAS. Itu yang berisikan data potensi, data-data yang lain, itu direncana kerjanya.

W	Kemarin saya sempat foto beberapa, tapi saya cob acari lagi. RKHD itu masuk AD ART ya Pak?
H	Bukan, dia rencana kerja.
J	Bukan, iya dia lebih ke rencana kerja. 5 tahun itu kah kak? Yang direncanakan? Yang RKHD?
H	35 tahun.
J	Oh 35 tahun, oh yang RTHD kah yang per tahun dia?
H	Itu diturunkan menjadi rencana tahunan, nahh.
W	Uh sama ini Kak, apakah sama dengan Rencana Kegiatan dan Bidang Usaha Hutan Desa?
H	Apa?
W	Kemarin sempat foto tapi namanya itu Rencana Kegiatan dan Bidang Usaha Hutan Desa. Apakah itu sama?
J	Itu ada di rencana, RKHD dan RTHD, mangkannya kalau rencana usaha.
H	Kan sekarang berubah lagi, sekarang RKPS, RUPS, kan begitu-begitu sekarang. Kalau dulu uh, dulu kan disebut Perhutanan Sosial, baru disebut Perhutanan Sosial. Dulu itu kan dokusnya di Hutan Desa. Mangkannya dokumen yang lahir itu adalah Rencana Kerja Hutan Desa, Ijin Kelola, lalu kemudian rencana kerjanya! Rencana umum sih rencana kerjanya ini. Yang didalamnya itu ada macam-macam, ada luasan, ada data potensi.
W	Oh yah yah saya punya kak, tapi coba saya kirim untuk double check apakah yang dimaksud ini atau bukan.
H	Boleh-boleh.
W	Oiya Kak, minta maaf mau saya pastikan dulu. Terkait hutan desa sebelum dan sesudah ada donor. Nah itu ketika donor baru masuk lebih tepatnya bukan merubah tapi internalisasi jadi daripada membentuk LKHD dilakukan internalisasi penguatan BUMDes, namun untuk di Campaga itu sendiri barulah dibuat BUMMas, Badan Usaha Milik Masyarakat. Setelah tidak adanya donor, 2017 itu hampir sama kelembagaannya namun untuk Campaga lebih fokus ke wistaa, karena itu adanya penambahan Pokdarwis. Kenapa wisata itu lebih maju, karena Pemkab memberikan perhatian lebih ke hutan desa. Dan disini Balang membantu presentasi ke Pemkab dan lebih tepatnya ke Dinas Pariwisata untuk pengembangan pariwisata di Campaga. Lalu saya tanya terakhir, terkait bagaimana pembagian hutan desa apakah ada rujukan atau bagaimana ya Kak? Kenap dibagi menjadi 3, Campaga, Labbo', dan Patteneteang?
H	Itukan kalau berdasarkan wilayah. Sebenarnya saya belum menemukan rujukan undang-undangnya adanya batasan wilayah desa dalam hutan kan. Tetapi secara lanskap, mungkin ditetapkan, jadi ada pengusulan dari pemerintah desa, mengusulkan wilayah lalu ada verifikasi teknis kan. Wilayah kerja. Labbo' itu secara lanskap bersambung dengan Patteneteang akan tetapi wilayah-wilayah di luar kawasan hutan menajdi...mungkin yah ini saya tidak anu saja. Penetapannya saya tidak tahu persis kenapa. Lalu kemudian, menajdi bahagian dari Patteneteang sendiri san Labbo' sendiri, dibatasi dengan juga mungkin dalam kawasan hutan itu ka ada orang yang mengeloa sebelum hutan desa. Seingat saya dulu itu ada GNRHL, saya lupa tahunnya. Gerakan Nasioanl Reboisasi Hutan dan Lahan. Ada aturan yang memungkinkan

	masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan, menanam, merehabilitasi lah lebih tepatnya. Nah orang-orang Pattenetang ini dan Labbo' sendiri masuk menanam kopi, nah itu lah yang menjadi batas antar Labbo' dan Patteneteang. Kalau di Campaga sendiri, jauh terpisah kan, jadi kalau Labbo' dan Patteneteang seperti itu yang diusulkan pemerintah
W	Oh begitu Pak, izin bertanya sekali lagi. Untuk pengajuan hutan deas itu sendiri, inisiasi pemerintah langsung atau pemerintah ini didukung RECOFTC dan UNHAS untuk mengajukan itu Pak?
H	Kalau untuk Bantaeng itu sendiri, seingat saya itu waktu itu kan bupatinya Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah ini backgroundnya kehutanan terus waktu itu ada program pemerintah yang berkaitan dengan Hutan Kemasyarakatan, atau apalah namanya waktu itu. Di tahun 2007 kalau saya tidak salah ingat, Mentri Kehutanan pernah berkunjung ke Bantaeng, Campaga ya. Disitulah awal mulanya. Konon katanya pemerintah kabupaten menginisiasi pengusulan hutan desa, nah mungkin, saya belum terlibat saya masih belum terlibat, artinya kami belum tahu prosesnya sampai RECOFTC, Pemkab dan UNHAS berkolaborasi. Ketiga lembaga besar ini yang menginisiasi dan mendorong dan memfasilitasi sampai lahirnya hutan desa dan kelembagaannya, administrasinya, dan kelembagaannya.
W	Dari saya pertanyaannya selesai. Namun saya ada satu lagi untuk Kak Edi. Bolehkah saya meminta nama-nama program Balang di hutan desa kak? Karena sejauh ini yang saya peroleh hanya kopi yang video youtube itu sama wawnacara di Jakarta itu.
J	Bisa nanti kami kasih Mbak Wening.
W	Baik, Kak siap-siap.

Transkrip Wawancara bersama Perwakilan Universitas Hasanuddin 1

Waktu wawancara: 15 Juli 2024

Perwakilan huruf dalam wawancara:

S: (Perwakilan Universitas Hasanuddin 1)

W: (Wening-Pewawancara)

S	Setelah selesai projectnya, kita handover ke Pemda. Tapi kan selama program itu berlangsung, kita juga bina LSM lokal Balang. Jadi setelah program RECOFTC selesai itu, Balang handle lagi dan sudah banyak yang datang. Ada Kementerian Dalam Negeri bawa program bantuan. Sudah banyak program setelah RECOFTC. RECOFTC juga masih ada program, tapi programnya tidak dengan MoU misalnya yah. Program-programnya di Indonesia terus dibawa lagi kesana. Misalnya, program peningkatan kapasitas untuk pemasaran, nah itu ya pelatihan itu. Uuh, market analysis and development, menganalisis pengembangan pasar. Ya program-program RECOFTC di Indonesia ya dibawa ke sana juga. RECOFTC tuh kan capacity building isinya, termasuk yang ini capacity building yaitu cara mengakses skema hutan desa.
W	Berarti dari 2010 itu pak sudah....
S	Secara kontrak project.... Itu project namanya "Enhancing Capacity to Improve a Multibase Forest Management" fase 2 itu dua tahun. Fase dua itu dua tahun, setelah itu ya program RECOFTC di Indonesia tetap ada kan.

W	Tapi nggak khusus ke hutan desa ya Pak.
S	Bukan khusus untuk hutan desa Bantaeng hutan desa. Itu untuk semua, ada beberapa site ada di Maros, ada di Soppeng. Ada penelitian-penelitian juga, tetap kita terlibat UNHAS, tetap juga dengan saya yang pengembangan pasar. Tapi bukan lagi khusus untuk hutan desa. Lissa itu kan untuk pengembangan pelatihan atau training baru.
W	Oiya Pak, kan dulu masih DLHK yang mengurus, lalu kemudian lembaga ini ditarik ke provinsi apakah ada pengaruh pak?
S	Kan masih ada KPH di sana. Hutan desa ini kan bukan cuma kehutanan, kita memang buat pendekaannya semua sektor. Jadi RECOFTC hilang dihandle oleh Dinas Kehutanan tapi tetap dibina oleh Dinas Pemberdayaan Desa, Dinas Pertanian dan macam-macam. Bukan cuma kehutanan, karena memang pendekatannya bukan sectoral, kita memang buat multisector. Jadi semua sektor terlibat, Departmen Koperasi, Biro Hukum.
W	Itu bagaimana hubungannya pak, kan ke pemerintah daerah pak ya, itu artinya gubernur pak?
S	Bupati
W	Uhh, iya.
S	Hutan Desa itu urusannya bupati.
W	Uh maaf pak baru sadar. Karena selama wawancara, masyarakat ini pahamnya masih RECOFTC yang pegang sampai 2017, baru ketika semua pelatihan hilang, mereka berjalan sendiri. Tapi tidak ada yang bilang handover ke Pemda.
	Anu Balang, Balang banyak fasiliatsi, pelatihan-pelatihan madu ya? Kopi dengan mitra-mitra yang lain. Tapi kalau RECOFTC ya yang dulu itu, tapi tetap ada program RECOFTC. Tapi setelah itu kita evaluasi lagi, bagaiman perubahan tutupannya. Ada dulu namanya dari programnya dari IRI, memantau apa yang terjadi di hutan desa. Itu setiap 5 tahun harusnya. Tapi kalau nggak salah, sekali ji.
S	Itu tahun berapa pak evaluasinya?
W	Kalau nggak salah 2 tahun setelah itu selesai
S	2012
W	Sekitar tahun itu. RECOFTC memang tidak pernah berhenti, tapi untuk hutan des aitu 2 tahun itu. Setelah itu handover ke pemerintah daerah ke bupati. Setelah rapat penutupan, diinformasikan bahwa program telah berakhir, silahkan handover, lanjutkan programnya. Ke Bapak Bupati, Pak Nurdin Abdullah. Balang juga sudah eksis, dia juga carikan donor-donor, macam-macam. Nah RECOFTC karena ada programnya di Indonesia ya tetap ada pelatihan di sana. Tapi bukan hanya hutan desa, Bu Nunu pernah ditraining, Bu Adra. Bukan Cuma kelompok, masyarakat, semua, ada penulisan buku, pelatihan, tetap kerja sama dengan kita. Penelitian itu kita pernah ke Bangkok, saya, Bu Nunu, Pak Alif untuk presenatsi dulu. Tapi bukan cuma hutan desa tapi capacity building.
S	Kan itu Pak, BUMMas cari beberapa funding ke luar termasuk tanya ke Pemda, kalau dari jawabannya Direktur BUMMas
W	Siapa sekarang Direktornya BUMMas?
S	Pak Abdul Rahman, dulunya sekretaris Pak.

W	Katanya tidak bisa karena tidak punya status hukum. Nah itu kalau tidak bisa, apakah kolaborasinya dengan Pemda yang kurang atau bagaimana Pak?
S	Sama saja statusnya yang saya tahu ya. Dia kan bukan dipilih oleh masyarakat lurah, karena itu Badan Usaha Milik Masyarakat. Dia kan dipilih bupati. Harusnya sih sama, coba cari kebijakannya BUMMas. Saya ndak tahu bahwa tidak bisa itu. Kalau mau itu, coba tanya Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten. Kan dia yang fasilitasi pembuatan BUMDes. Kan yang punya urusan itu.

Transkrip Wawancara bersama Perwakilan Universitas Hasanuddin

Waktu wawancara: 15 Juli 2024

Perwakilan huruf dalam wawancara:

A: (Perwakilan Universitas Hasanuddin 2)

W: (Wening-Pewawancara)

A	Untuk bisa berjalan hutan desa di Campaga itu dibuat BUMMas. Tapi setelah itu masuk AgFor. Programnya ICRAF, termasuk daerah Campaga itu. Dia fasilitasi itu. Termasuk dia fasilitasi nilai air. Karena kalau Campaga itu sumber air bagi desa lain. Jadi itu dulu kan pengelolanya BUMMas.
W	Yang fasilitasi itu penelitian Pak?
A	Bukan penelitian, dia sudah FGD ya bersama masyarakat dengan teman seperti PDAM. Kalau saya ndak salah ada kaiannya itu, bagaimana nilai air.
W	Nah untuk implementasinya bagaimana Pak?
A	Belum ada pembayaran ya saya rada. Memang apa namanya, masyarakat itu sulit membayar. PDAM dulu diharapkan membayar ke masyarakat sih.
W	Tapi belum ada ya pak termasuk PDAM?
A	Belum, belum. Kan itu tidka luas juga hutannya, 10 hektar ya?
W	23 hektar Pak.
A	Karena memang tidka banyak disentuk itu sebnearnay Campaga. Jadi memang, perlindungannya terhadap mata air itu yang.... Bagaimana melindungi mata air itu dengan hutan seluas 20 hektaran itu. Oleh apa namanya, BUMMas, karen adulu itu sudah dikapling kapling itu. Itulah sebenarnay Upaya untuk tetap, hutan bisa berfungsi.
W	Itu kajiannya berapa tahun Pak?
A	Banyak, termasuk desa-desa termasuk Labbo', Patteneteang, dan desa lain.
W	Itu dari tahun 2010 ke 2015 Pak?
A	Saya lupa. ICRAF itu AgFor, malah pusatnya di Bantaeng. AgFor itu banyak membahas SDM.
W	SDM bagaimana Pak?
A	Seperti membuat benih. Termasuk Balang itu kerjasamanya. Balang.
W	Oiya Pak, untuk aktivitas di hutan desa, utamanya di Campaga selama ada AgFor apakah cukup
A	Yang jelas AgFor itu langsung memfasilitasi nilai kompensasi air.
W	Dari masyarakatnya snediir cukup mengerti atau bagaimana respon mereka Pak?
A	Kalau masyarakat di atas pasti paham, tapi masyarakat di bawah kan yang agak susah, karena kan banyak desa-desa lain yang. Beberapa des aitu yang dialiri air. Termasuk air yang masuk ke Pajukkukang itu kan dari sana. Disitu

	sebenarnya yang penting ya nilai air. Jadi bukan jasa saja ya, jasa air. Tidka seperti di Labbo' dan Pattenetang yang produk seperti madu dan kopi. Kalau BUMMas, Badan Usaha Masyarakt ya sebagai lembaga pengelola hutan desa itu. Di situ diresmikan hutan desa oleh Menteri Pak Kaban.
W	Oiya Pak, evaluasi dari Hutan Desa Campaga setiap 5 tahun dilakukan atau bagaimana Pak?
A	Sudah ada dievaluasi sebenarnya. Yang jelas, hasil evaluasi di Bantaeng ada 3. Dari sisi ekonomi, ekologi bagus. Namun dari sisi sosial, terutama di Labbo' dan PAttenetang. Terutama pilkades, karen aketua BUMDes nay maju sebagai Kapala desa. Tapi dari sisi pengelolaan hutan itu kan BUMDes bukan penggarap tapi pengelola. Artinya dia pemilik izin. Yang mengerjakan itu ya kelompok tani. Ya dari dulu garapannya di situ. Kan sebenarnya awlanya itu terjadi karena banyak masyarakat diangakt, dikasih masuk di kawasan hutan. Karena garapannya banyak di dalam, ditangkap kepala dinas kehutanan. Setelah itu, pak bupati dia minta ke fakultas untuk tolong dipikirkan solusi supaya masyarakat jangan ditangkap terus. Dipenjara toh. Nah kena tindak pidana ringan, dikasih masuk ke sel. Kebetulan kita, Prof. Supe dan beberapa teman di Lab Kebijakan. Kebetulan ada skema hutan desa, jadi kita lihat HKm, HD, HR. kita pilih mana yang lebih cocok. Karena di situ hutan lindung semua, nah paling cocok kita pikirkan adalah hutan desa. Karena beda itu hak yang diberikan hak hutan desa, hkm, dan htr toh. Kalau hutan desa pengelolaan, kalau hkm pemanfaatan saja. Nah bedanay itu kalau hak pengelolaan itu dia hubungannya dengan perlindungan hutan. Kalau pemanfaatan, dia budidaya saja toh. Karena itu kita kasih hutan desa, lalu kita lihat lembaga, ada BUMDes untuk beri izin. Tapi bukan BUMDes yang mengerjakan, karena sudah ada masyarakat di dalam. Jadi dilegalkan sebenarnya, bagaimana melegalkan supaya masyarakat tetap aman dan mengelola hutan di dalam. Dengan syarat tidak menebang kayu, hanya bisa menanam kopi. Nah itu banyak kopi di sana toh. Dan fasilitasi dulu itu banyak yang SDM. Jadi kegiatan-kegiatan fisik, kita kerja sama dengan yang lain. Seperti Pemda, Dinas Perkebunan bikin jalan ke kebun-kebun, Dinas Kehutanan menguruskan izinnya, memberikan bantuan bibit dan seterusnya. Ada juga Dians Perindustrian untuk pengelolaannya. Ada juga bantuan dari Menteri Dalam Negeri utnuak bantuan pengembangan hutan desa.
W	Itu yang mengusahakan ke Menteri Dalam Negeri itu siapa Pak?
A	Yah kita usahakan mintakan.
W	Itu UNHAS ya Pak?
A	Bukan, Pemda. Kan ada untuk mendorong masyarakat. Jadi memang banyak pihak-pihak terkait yang kita libatkan. Termasuk kepala desanya dia kuat mencari
W	Pemda dalam hal ini itu Pak Nurdin?
A	Iya Pak Nurdin. Bupati. Termasuk itu juga programnya mendiirkan pengelolaan kopi, itu juga kita mintakan dari Kementerian Perindustrian. Pemasaran, dulu kan murah, dikasih cara pemanenan, akhirnya harga naik. Kita juga dorong lembaga-lembaga masyarakat hutan toh untuk membentuk lembaga, salah satunya itu Balang. Ada siapa disitu, kita bentuk. Termasuk Ketua BUMDes ada disitu. Sekarang sudah jadi LSM Nasional, kerja sama

	internasional itu sudah bisa. Tapi memang khusus itu, fokus dulu bagaimana nilai air. Karena tidak ada juga masyarakatnya menggunakan itu.
W	Iya benar-benar Pak, karena mereka mengkeramatkan.
A	Mengkeramatkan, jadi bagaimana supaya tetap bisa dapat kesejahteraan dari situ. Harus ada nilai kompensasi di situ.
W	Itu Pak, ketika ada proyeknya AgFor, apakah ada lembaga lain yang ikut atau hanya ICRAF saja Pak?
A	ICRAF itu kerja sama dengan beberapa lembaga toh. Nah ICRAF di dalam, UNHAS ada, kemudian ada dari CIFOR. Ada orangnya CIFOR untuk riset. Intinya ICRAF disitu. Daya lihat kerjanya AgFor dia menggandeng beberapa lembaga termasuk Balang. Tapi penanggungjawabnya itu ICRAF atau World Agroforestry Network. Karena dia merasa berhasil di Bantaeng, pimpinan telepon saya dan uruskan di gubernur, ada di Bone 2 tahun jalan mi. namanya programnya itu Land for Lifes, jadi lahan untuk kehidupan.
W	Sama ya pak kompensasi.
A	Bukan, dia berfokus ke pengembangan masyarakat. Dulu ada 6 desa yang dievaluasi berhasil dia minta selain Bantaeng, kita kasih Soppeng, Bone, Maros. Dia pilih Bone.
W	Itu pak setelah ICRAF tidak di sana, bagaimana aktifitas di hutan desa pak?
A	Sebenarnya hutan desa tetap jalan, masyarakat, tidak pernah berhenti. Kadang yang tidak aktif ya BUMDes nya. Tapi kalau masyarakat ya tetap jalan, karena garapannya kan. Karena itu hasil evaluasi, meskipun tidak ada bantuan dari mana mana, tetap luasan bahkan bertambah luas dan juga ekonomi masyarakat berkembang. Akrena masyarakat dari dulu punya hutan desa. Sebelum ditetapkan hutan desa, dia sudah punya lahan garapan di hutan. Tinggal kita setelah legalkan, dia kan aman toh. Dia bisa beraktivitas di situ. Dilindungi hukum, tidak bisa mi dipenjara. Nah itu awalnya Pak Bupati, jangan masyarakat dipenjara. Jadi kita legalkan masuk, setelah itu dibina. Dulunya umpama tidak mau menanam pohon, disuruh tanam pohon. daerah kritis suruh tanami kopi dan pohon. yang berpengetahuan itu yang luar saja. Karena itu evaluasi 2019 itu bagus, karena dia sudah diberi hak untuk mengelola.
W	Untuk yang Campaga itu Pak, untuk bisa menerapkan kompensasi itu butuh apa saja ya Pak? Karena kata bapak, sedikit sulit untuk masyarakat membayar.
A	Sebenarnya harus ada kebijakan yang menarik pajak, yang paling mudah PDAM. Dikasih kompensasi ke desa. Sebenarnya ini kompensasi tidak dikatakan dari air toh. Seperti kegiatan pembangunan di desa itu, termasuk dari LPHD toh. Artinya dikasih, jalan diperbaiki, bukan uang dikasih masyarakat disitu. Cuma tidak dikatakan sekian diberikan kembali ke masyarakat. Tapi program tetap jalan, seperti bantuan bibit ke masyarakat. Malah AgFor latih masyarakat membuat bibit agar bisa menjual. Sempat ditarik ke Gorontalo, LSM itu, melatih orang membuat desa.
W	Itu program kebun bibit desa?
A	Kebun Bibit Masyarakat adanya. Dulu itu memang RECOFTC yang mengawali, masyarakat diajari menanam pohon, dibawah tegakan menanam kopi, pemasaran dan produksi kopi. Banyak Pattenetenag, Labbo'. Banyak tanaman kayak markisa.
W	Maaf Pak, bapak dulu Kepala Dinas Kehutanan?

A	Bukan, Dinas Pertanian dan Peternakan. Karena itu sering beri bantuan bibit.
W	Itu di luar kawasan hutan Pak?
A	Tidak, di dalam itu kopi.
W	Saya pikir kalau kopi masuk Perkebunan Pak.
A	Kalau kopi juga masuk pertanian. Di Bantaeng iru Perkebunan masuk divisi pertanian.
W	Oh jadi bapak dulu Kepala Dinas Pertanian
A	Dan Peternakan, lalu Dinas Pendidikan
W	Tahun berapa yang Dinas Peternakan Pak?
A	2010 sampai 2014, kemudian 2014-2016 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, kemudian Kepala BAppeda sampai 2018. Tapi sebelumnya saya sama Prof. Supe kegiatan hutan desa. Prof. Supe atas nama RECOFTC, dikontrak tim nya RECOFTC. Saya timnya UNHAS toh. Tapi sebenarnya sama-sama UNHAS.
W	Kalau Prof. Supe sebagai ahli ya Pak?
A	Bukan koordinator. Jadi ada kerjasama RECOFTC dengan UNHAS.